



BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan diuraikan data hasil temuan dilapangan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang akan disajikan ini diperoleh dengan melalui penelitian lapangan selama 3 bulan, yang dilakukan baik melalui wawancara, observasi maupun studi dokumenter. Untuk mendapatkan keabsahan data maka dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu teknik pemeriksaan data yang membandingkan dan mengecek balik derajat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dengan waktu, alat dan sumber lain yang berbeda dengan menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu peneliti melakukan perbandingan sebagai *cross-check* dengan membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif dari pihak-pihak yang terkait dengan pendapat dan pandangan kelompok masyarakat (sasaran), selain itu juga membandingkan hasil wawancara di lapangan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penarikan sampel penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Jadi dalam pemilihan informan, peneliti mengikuti alur atau rekomendasi informan sebelumnya. Pada awal penelitian ini, peneliti memulai dengan menemui Ketua Pusham Unair, Bapak Drs. Bambang Boediono MS, yang kemudian diarahkan kepada teman-teman Pusham Unair untuk melengkapi sumber data. Kemudian peneliti melanjutkan ke lapangan yaitu ke Kecamatan Sukolilo dan bertemu dengan Camat Bapak Drs. Subagiyo dan Sekretaris Camat



Bapak Drs. Agus Suryono, lalu ke Kelurahan Keputih bertemu dengan Lurah Keputih Bapak H.M Badjuri S.H dan ke Kelurahan Klampis Ngasem juga bertemu dengan Lurah Klampis Ngasem Bapak La Koli S.Sos. Selain itu peneliti juga menemui Ketua Pokja COP di Keputih Bapak Sugiyono sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Pokja COP, Ketua Pokja di Klampis Ngasem Bapak Daman Huri S.E sekaligus sebagai sekretaris Asosiasi dan juga menemui beberapa informan lainnya yang berkembang sampai informan yang terakhir.

Selanjutnya untuk memperoleh kedalaman dan kerincian data, peneliti juga melakukan penggalan data pada beberapa aparat lainnya, guna mendapatkan informasi sebagai *cross check*. Aparat tersebut antara lain aparat dari Kelurahan Keputih, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, dan juga aparat kepolisian Polsek Sukolilo.

Sesuai dengan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka selanjutnya adalah mencari data-data dan informasi yang ada di lapangan mengenai implementasi COP agar dapat selanjutnya dianalisis dan diinterpretasi. Oleh karena itu penyajian data ini akan diuraikan dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian, yaitu implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program COP. Jadi sebagai awalnya dapat langsung difokuskan pada penyajian data mengenai implementasi program COP di Kelurahan Keputih, implementasi program COP di Kelurahan Klampis Ngasem, dan setelah itu dilanjutkan dengan penyajian data

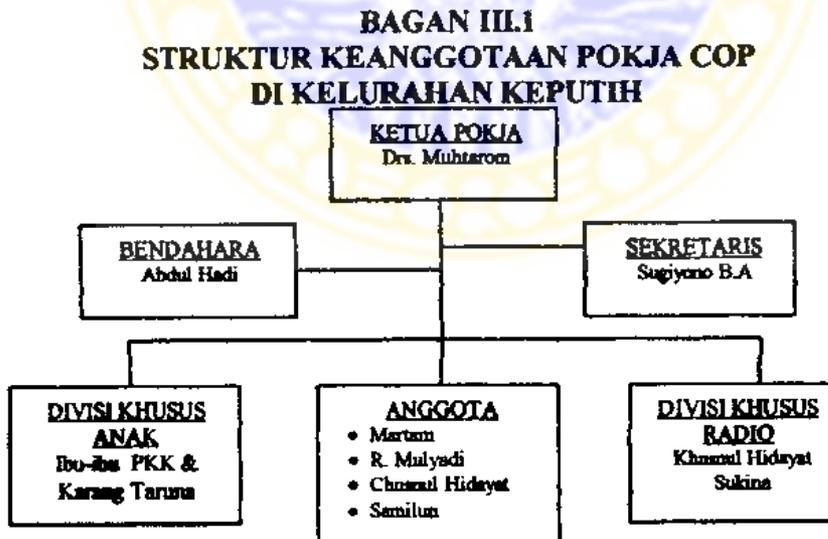


mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi COP tersebut, untuk lebih jelasnya berikut adalah uraiannya.

III.1. IMPLEMENTASI PROGRAM COP DI KELURAHAN KEPUTIH

III.1.1. Struktur Pengorganisasian Dan Proses Pembentukan Pokja

Pokja COP di Kelurahan Keputih ini sudah terbentuk pada pertengahan bulan April 2004 bersamaan juga dengan Pokja COP di Kelurahan Klampis Ngasem yang berada di dalam wilayah Kecamatan Sukolilo. Struktur pengorganisasian Pokja COP di Kelurahan Keputih ini diketuai oleh satu orang ketua, dibantu satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan terdiri atas 4 anggota lainnya, selain itu terdapat juga bagian divisi khusus anak dan divisi khusus radio. Dan berdasarkan struktur pengorganisasian keanggotaannya, yaitu sebagai berikut :



Untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembentukan Pokja COP di Kelurahan Keputih, maka informan yang ditemui untuk memberikan informasi



tersebut adalah ketua Pokja COP Klampis Ngasem. Pada saat awal wawancara informan menceritakan mengenai awal terbentuknya COP di Klampis Ngasem, dan informasinya adalah sebagai berikut :

“...COP ini diprakarsai oleh Pusham Unair bersama The Asia Foundation sebagai lembaga donor. Jadi waktu itu tim dari Pusham Unair mengadakan pertemuan sosialisasi dengan elemen masyarakat di Keputih ini, bersama dengan Polsek dan Koramil, tokoh masyarakat RT/RW, Lurah semua dikumpulkan untuk sosialisasi serta diskusi mengenai reformasi Polri, mengenai hubungan polisi dengan masyarakat, dan juga membahas mengenai masalah kamtibmas yang ada di Keputih ini. Lalu pertemuan-pertemuan berikutnya kita membahas mengenai pemetaan masalah di Keputih. ...Pada awal pertemuan masyarakat seakan-akan mengeluarkan uneg-uneg tentang kepolisian. Pada saat itu juga sempat terjadi emosi dari masyarakat, bahkan pihak kepolisian juga ikut terpancing emosi, begitu juga dengan Pusham Unair. Tapi akhirnya emosi dari masyarakat tersebut kembali reda. Dan setelah masyarakat diberikan pengertian kita mengadakan pertemuan berikutnya, dengan membahas pemetaan masalah yang ada di Keputih, akhirnya kita sepakat untuk membentuk Pokja pada pertemuan ke-3...”¹

Informasi di atas juga dilengkapi oleh informasi dari sumber yang berbeda yaitu dari sekretaris Pokja Keputih, informasi yang diberikan hampir sama adalah sebagai berikut :

“...Proses pembentukan Pokja di Keputih ini diawali oleh kedatangan Pusham Unair ke kantor Kelurahan. Dimana setelah itu itu Pusham Unair mengundang semua elemen masyarakat di Keputih, yang agendanya adalah akan membahas permasalahan kamtibmas, sosialisasi program COP dan membahas isu-isu mengenai polisi. Kebetulan saya diundang pada waktu itu dan ikut menghadiri pertemuan itu, karena atas nama Ansor saya hadir. ...Semua elemen yang ada di sini juga dilibatkan antara lain LKMK, dari Muhammadiyah, NU, dari aparat kelurahan, juga aparat kepolisian (Babinkamtibas, Polsek Sukolilo), tokoh masyarakat RT/RW, karang taruna, PKK, dsb. Pada saat awal

¹ Wawancara dengan Bpk Drs. Muhtarom (Ketua Pokja COP Keputih), di Jl Keputih Gang III No.46, Tanggal 21 Juli 2006.



pertemuan tersebut, yang saya tahu agenda pertemuan tidak berjalan lancar, karena waktu itu yang menjadi sasaran masyarakat adalah kepolisian, dan masyarakat mencurigai pihak dari Pusham Unair/tim COP sebagai mata-mata polisi. Setelah pertemuan pertama selesai tidak lama kemudian ada pertemuan kedua, di pertemuan kedua ini sudah dipancing oleh Pusham Unair supaya di bentuk Pokja COP di Kelurahan Keputih. Dalam pertemuan itu agendanya adalah mengidentifikasi masalah, dan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada tersebut. ...Maka setelah itu disepakati untuk dibentuk Pokja di Keputih. Dalam pembentukan Pokja itu Pusham juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dan polisi, yaitu melalui workshop, FGD, ada juga pelatihan tentang analisis SWOT, dsb. Setelah itu masyarakat mengerti dan mendukung program ini sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang ada di Kelurahan Keputih...²

Selain Ketua dan sekretaris Pokja COP, peneliti juga berhasil mewawancarai koordinator radio COP 104 FM, mengenai tahapan/proses pembentukan Pokja COP di Kelurahan Keputih. Dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Asal mula ada COP di sini karena ada dari Pusham Unair yang melakukan sosialisasi mengenai COP. Sosialisasi itu dilakukan dengan diskusi-diskusi, kira-kira waktu itu ada 3 kali sebulan (3 kali pertemuan), dan setelah 3 kali pertemuan itu barulah warga mengerti tentang COP lalu dibentuklah Pokja COP di Kelurahan Keputih, pembentukannya itu kira-kira pada akhir bulan April 2004. Pada saat itu masyarakat memang masih banyak belum merespon, namun setelah diberikan pengarahan akan pentingnya menjaga keamanan yang merupakan tanggungjawab bersama dan juga dibuat pelatihan (*workshop*) bersama antara masyarakat (terutama relawan pemuda dan tokoh masyarakat) dengan polisi beberapa kali baru sebagian masyarakat mulai mengerti dan merespon baik COP...³

² Wawancara dengan Bpk Muhammad Soegiyono B.A (Sekretaris Pokja COP Keputih & Ketua Asosiasi Pokja COP Surabaya), Tanggal 22 Juli 2006.

³ Wawancara dengan Mas Khusnul Hidayat (Koordinator Radio COP & anggota Pokja COP Keputih), Tanggal 15 Juli 2006.



Berdasarkan informasi beberapa sumber di atas, dapat diketahui bahwa pembentukan Pokja COP di Keputih ternyata mengalami berbagai proses. Dalam proses pembentukan Pokja tersebut seluruh elemen masyarakat dan kepolisian telah dilibatkan oleh Pusham Unair dengan 3 kali pertemuan (forum). Dapat dilihat pula di atas bahwa dalam pertemuan tersebut, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, baik permasalahan dari masyarakat maupun dari kepolisian dan juga ditambah dengan sosialisasi program COP.

Respon masyarakat pada awal masuknya program ini di Kelurahan Keputih dapat dilihat di atas kurang mendapatkan perhatian ataupun dukungan. Namun setelah diberi pengarahan mengenai pentingnya masalah kamtibmas sebagai tanggungjawab bersama, dan diberikan pelatihan-pelatihan akhirnya sebagian masyarakat di Kelurahan Keputih menjadi mendukung tujuan program COP tersebut. Maka, program COP telah menjadi kesepakatan para tokoh masyarakat di Kelurahan Keputih termasuk kepolisian dari Polsek Sukolilo untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif solusi menangani masalah-masalah kamtibmas yang ada hingga ke akarnya, seperti pencurian sepeda motor, kepadatan penduduk, perjudian dan miras.

III.1.2. Karakteristik Implementasi Program COP & Penanganan Masalah

Kelurahan Keputih merupakan salah satu wilayah yang dijadikan *pilot-project* bagi program COP, karena wilayah ini termasuk yang rawan terjadi permasalahan mengenai kamtibmas. Berdasarkan data sekunder, di Kelurahan



Keputih sering terjadi tindak kejahatan pencurian sepeda motor, perjudian, miras dan penggunaan narkoba. Dimana jenis kejahatan tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk pendatang (mahasiswa dan penghuni kos-kosan non-mahasiswa), banyaknya penduduk pendatang tersebut juga menjadi masalah bagi pendataan penduduk Kelurahan Keputih.⁴

Untuk mengetahui bagaimana karakteristik masalah yang ada di Kelurahan Keputih, maka terlebih dahulu peneliti menemui Lurah Keputih. Dalam hal ini peneliti mencari sumber dengan mewawancarai Lurah Keputih untuk memberikan informasi mengenai karakteristik wilayahnya dan juga mengenai permasalahan kamtibmas yang ada. Dan hasil wawancara itu didapati informasi sebagai berikut :

“...Di sini mas banyak sekali warga pendatang terutama mahasiswa yang banyak tidak terdata terutama di areal kos-kosan, karena di sini memang banyak kampus seperti ITS, Hangtuah, Putera Bangsa, dsb. Akibatnya yang timbul dari banyaknya warga pendatang adalah pencurian sepeda motor yang sering terjadi mas, terutama korbannya mahasiswa. ...Untuk masalah narkoba saya jarang mendengar, mungkin karena tidak ada yang melapor ke saya, tapi yang saya pernah dengar di wilayah Kecamatan Sukolilo ini pernah ditemukan pabrik narkoba, kalau tidak salah di daerah Nginden. ...Disini merupakan daerah pinggiran yang sering dijadikan tempat pembuangan akhir, ya seperti sampah, tinja. ...Pemah juga terjadi masalah mengenai jalan depan kantor ini mas yang rusak parah, dan warga meminta agar jalannya diperbaiki. Saat itu sempat terjadi juga konsentrasi massa atau demo di kantor ini karena permintaan warga tidak direspon oleh Pemkot, tapi alhamdulillah akhirnya Pemkot mengabulkan setelah permintaan warga difasilitasi oleh tim COP...”⁵

Peneliti lalu meneruskan wawancara dengan Lurah mengenai pelaksanaan COP di Keputih, dimulai dengan pertanyaan “*bapak tahu tidak tentang COP, dan*

⁴ Laporan Program Community Oriented Policing (April-Desember 2004), Pusham Unair, Surabaya 2004, hal 8

⁵ Wawancara dengan Bpk Badjuri S.H (Lurah Keputih), di Kantor Kelurahan Keputih, tanggal 17 Juni 2006, jam 11.00 WIB.



bagaimana menurut bapak pelaksanaan COP di Keputih ini ?”, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...la saya tahu tentang COP, COP itu bagus, praktis dan membantu polisi terutama di tingkat bawah. Saya mendukung sekali COP, kadang-kadang disini terjadi masalah keamanan, teman-teman COP bersama-sama dengan warga mencarikan solusinya dulu, tidak langsung dibawa ke kantor polisi, jadi meringankan juga kepolisian. ...Dan respon masyarakat disini sangat setuju sekali dengan COP, terbukti kita sangat antusias mengikuti pertemuan-pertemuan atau diskusi COP bahkan sampai tengah malam di kantor Kelurahan ini...”⁶

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi, maka peneliti juga mewawancarai ketua Pokja COP Keputih untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik masalah yang ada di Kelurahan Keputih. Dan hasil informasinya adalah sebagai berikut :

“...Untuk masalah kamtibmas atau tindak kriminalitas, curanmor yang paling sering. Sasarannya adalah kampus terutama bagi warga pendatang, terutama ditempat kos dan mahasiswa yang menjadi target karena menurut saya masih ada kesenjangan antara warga pendatang dengan warga asli sini. ...Namun kita selalu melakukan sosialisasi kepada warga di sini untuk sadar hukum dan tetap hati-hati terhadap pencurian kendaraan bermotor. Kita juga buat stiker-stiker, poster, untuk himbauan agar mewaspadai pencurian, kita juga menghimbau dengan menginformasikan mengenai masalah pencurian atau masalah kamtibmas lainnya kepada warga melalui radio COP. ...Selain masalah pencurian juga masalah perjudian dan miras. Miras itu dampaknya besar karena bisa terjadi tawuran antar warga, yang waktu itu pernah terjadi. Untuk itu kita sadarkan, bahwa perjudian dan miras itu dilarang oleh undang-undang dan juga diberantas oleh polisi sekarang ini. Selain itu kita juga memfasilitasi dari pihak keluarga untuk memberikan pengertian dan kita sadarkan juga, terutama bagi warung-warung yang menjual miras. ...Kita mengharapkan masalah ini bisa kita selesaikan dengan mencari solusi penanganannya hingga ke akar masalahnya...”⁷

⁶ Wawancara dengan Bpk Badjuri S.H (Lurah Keputih), di kantor Kelurahan Keputih, tanggal 17 Juni 2006, jam 11.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bpk Drs. Muhtarom (Ketua Pokja COP Keputih), di Jl Keputih Gang III No.46, Tanggal 21 Juli 2006.



Setelah itu wawancara kembali dilanjutkan mengenai pelaksanaan program. Dan berdasarkan wawancara, didapati pelaksanaan program COP di Kelurahan keputih adalah sebagai berikut :

“...Pelaksanaan COP di sini kita melakukan banyak kegiatan sosial, kita menjembatani antara polisi dan masyarakat, bagaimana supaya polisi tidak sewenang-wenang pada masyarakat dan juga bagaimana masyarakat kembali percaya kepada polisi. Kita juga melakukan beberapa diskusi melalui forum dengan elemen masyarakat di Keputih, yaitu mengenai masalah kamtibmas beserta solusinya, termasuk tindak kejahatan yang kerap terjadi. ...Pokja COP Keputih juga melakukan pendataan bagi warga pendatang terutama di areal kos-kosan bagi mahasiswa, kita juga menyediakan jasa kepengurusan kipem (kartu izin penduduk musiman) melalui radio COP 104 FM* dengan biaya yang sangat murah, para warga pendatang tidak perlu mengurusnya dan menunggu lama di Kelurahan, karena kita yang mengurusnya di kantor Kelurahan secara kolektif dengan biaya yang lebih murah. Pokja COP Keputih juga melakukan kegiatan penyuluhan-penyuluhan di tingkat RW mengenai masalah kamtibmas, tindak kriminal, terutama curanmor, perjudian, miras, narkoba, dsb. Kita sifatnya bukan melarang keras dan langsung melaporkan ke aparat polisi, tapi dengan memberikan pengertian kepada warga...”⁸

Peneliti dalam hal ini juga mewawancarai salah seorang tim dari Pusham Unair, yang menjadi *field officer* di Pokja COP Keputih. Wawancara dimulai dengan pertanyaan mengenai permasalahan kamtibmas yang sering terjadi di Kelurahan Keputih, dan disambung dengan pertanyaan mengenai pelaksanaan program COP. Dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Di Kelurahan Keputih ini sering terjadi tindak kejahatan curanmor terutama bagi warga pendatang (mahasiswa), karena di sini banyak terdapat kampus. Masalah lainnya yang saya tahu, yaitu pernah ada demo warga mengenai jalan yang rusak parah di

⁸ Wawancara dengan Bpk Drs. Muhtarom (Ketua Pokja COP Keputih), di Jl Keputih Gang III No.46, Tanggal 21 Juli 2006.

*Radio Komunitas COP 104 FM, Jl. Keputih Gang III No.40, Kel Keputih, Kec Sukolilo, Surabaya.



depan kantor kelurahan, waktu itu sekitar Januari 2005. Warga sempat emosi hampir membakar kantor kelurahan, begitu juga supir-supir angkutan yang juga ikut demo dan menutup jalan. ...Namun waktu itu COP lebih mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah tersebut bersama dengan berbagai elemen masyarakat termasuk polisi. Setelah pertemuan itu maka kita sepakati untuk membuat dan kirim surat ke DPRD dan Pemkot. Teman-teman dari COP pada waktu itu yang membuat surat tersebut dengan ditandatangani oleh seluruh ketua RW, Lurah, maupun Kapolsek, dan kita juga ikut mendampingi demo warga agar tidak anarkis. ...Selain itu ada juga masalah mengenai penertiban PKL liar dengan alasan ada pembuatan jalan tersebut, dan juga ada PKL liar yang berjualan sudah mepet ke rumah warga. Namun akhirnya berhasil kita tertibkan ...Masalah sampah juga ada, yaitu di TPA Keputih Tegal yang diprotes warga dan akhirnya sudah dipindah ke daerah Benowo Tandes, masalah itu COP juga mendampingi dan menyelesaikan ke Pemkot dengan mencari akar permasalahannya...⁹

Selain informasi dari *field officer* Pusham Unair di atas, berikut juga adalah informasi dari aktivis Pokja COP di Keputih sebagai pembanding informasi yang telah didapat sebelumnya mengenai pelaksanaan COP di Keputih. Dan berikut adalah hasil wawancaranya :

“...Pelaksanaan program COP di sini sering mengadakan forum diskusi mengenai masalah kamtibmas bersama-sama dengan warga baik di balai RW, dan kelurahan. Selain diskusi kita juga melakukan berbagai sosialisasi COP antara lain melalui radio. ...Sosialisasi dan forum yang kita lakukan itu kebanyakan membahas tentang persoalan kamtibmas, maupun masalah sosial lainnya seperti masalah kependudukan, perlindungan hak anak, kekerasan dalam rumah tangga, dsb. ...Kita ikut membantu kelurahan dalam pendataan penduduk. Yang kita lakukan adalah pembuatan kartu Kipem bagi warga pendatang terutama penghuni kos-kosan, bahkan pihak Kelurahan telah mempercayakan kita untuk membantu untuk mendata siapa saja penduduk yang belum terdata (terutama mahasiswa) setelah itu kita buat Kipem. Pembuatan Kipem itu kita sosialisasikan terus melalui radio COP. ...Pelaksanaan program COP yang lain adalah kita pernah membantu warga yang demo akibat jalan yang rusak parah

⁹ Wawancara dengan Mas Lutfi (Tim Pusham Unair, Field Officer Pokja Keputih), Tanggal 17 Juni 2006, Jam 10.00 WIB.



terutama di jalan depan Kelurahan sampai jalan Arif Rahman Hakim. Kita dengan teman-teman lainnya memperjuangkan masalah tersebut ke Pemkot, dan tidak lama kemudian langsung diperbaiki. ...Di Pokja COP Keputih ini juga kita membuat divisi khusus anak pada bulan November 2005 yang lalu dengan menggandeng PKK, tujuannya adalah untuk melindungi hak anak dan melakukan sosialisasi perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Anak. Setelah ada divisi anak, kita tidak hanya membahas masalah kamtibmas saja, tapi juga masalah sosial. ...Di divisi anak ini antara lain memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu, kita memberikan seperti beasiswa khususnya bagi pelajar TK-SMA, terutama bagi pendidikan dasar. Itu semua merupakan bagian dari pelaksanaan Pokja kami...¹⁰

Untuk melengkapi lagi beberapa informasi di Pokja Keputih, peneliti kemudian kembali bertanya mengenai *“bagaimana alokasi maupun sumber dana yang didapat untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut, khususnya yang tadi dibidang memberikan beasiswa bagi anak sekolah dasar yang tidak mampu ?”*

“...Dana yang kita dapat yaitu dari donator, kita mempunyai donatur sekitar 150 orang yang tercatat dan stakeholders 50 orang, termasuk pengusaha dan pemilik lahan tambak. Dan untuk mekanisme dalam memberikan bantuan kita langsung minta data ke sekolah-sekolah mengenai siswa/i yang tidak mampu membiayai sekolah, yaitu TK sampai SMA (SD yang lebih diprioritaskan), dan bantuan tersebut langsung kita kasih ke sekolah untuk anak tersebut, dengan melakukan survey terlebih dahulu ke rumah anak yang tidak mampu itu apakah benar, kalau memang benar tidak mampu akan kita berikan bantuannya. ..Untuk mencari dana tersebut kita sistemnya jemput bola ke rumah-rumah, yaitu ke rumah para donatur, pengusaha atau stakeholders. Karena respon para donatur tersebut memang sangat mendukung kegiatan COP ini...”¹¹

Dari hasil wawancara beberapa informan di atas, peneliti juga mencari data sekunder yang ada mengenai karakteristik permasalahan, tindak lanjut dalam

¹⁰ Wawancara Mas Khusnul Hidayat (Koordinator Radio COP & anggota Pokja COP Keputih), Tanggal 15 Juli 2006.

¹¹ *Ibid.*



menangani masalah kamtibmas beserta dampaknya di Kelurahan Keputih, yaitu sebagai berikut :

TABEL III.1
HASIL TINDAK LANJUT MASALAH KAMTIBMAS
DI POKJA COP KELURAHAN KEPUTIH TAHUN 2005-2006

No.	Permasalahan	Penyelesaian	Tanggapan Polri	Hasil
1	Pengumpul sampah yang menimbulkan bau saat musim hujan	Diadakan forum, dan diperingatkan secara lisan melalui perwakilan warga dan polsek	Mendampingi warga saat forum dan ikut terlibat dalam proses pemberian peringatan bersama pengurus kampung	Sampah yang disetor sudah mulai berkurang dan masih dalam pengawasan warga
2	Tingginya tingkat pencurian motor	Polja memberikan himbauan-himbauan saat forum termasuk himbauan pemberian kunci ganda pada motor	Himbauan polisi dalam bentuk spanduk dan ikut dalam forum pertemuan warga. Babinkamtibmas memberikan nomor telepon Polsek dan pribadi agar penanganan dapat lebih cepat dilakukan	Laporan pencurian motor berangsur berkurang dan sekarang tidak ada
3	Adanya emosi warga yang ingin menutup jalan karena jalan di Keputih tidak dibangun dan tidak dihiraukan oleh pemkot	Polja mengorganisir melalui forum diskusi rutin agar tidak anarkis, dan disepakati untuk melakukan jalan diplomasi ke DPRD dan Pemkot sebelum melakukan aksi	Jika cara pertama tidak mendapat respon yang positif dari DPRD dan Pemkot, Polsek siap mengawal aksi tanpa anarki	Pembangunan jalan sudah mulai ditindaklanjuti oleh pemkot melalui dinas pembangunan umum
4	Kasus perkosaan yang dilakukan oleh pekerja di salah satu proyek pengembang perumahan	Polja mencari tahu pelakunya dan mengamankannya setelah itu dilaporkan ke Polsek	Polsek langsung datang ke lokasi kejadian dan langsung di proses	Pelaku sudah tertangkap dalam waktu kurang dari 24 jam oleh Pokja
5	Banyaknya anak putus sekolah dan bekerja di perempatan traffic light	Dibentuknya divisi anak pada bulan Juni 2004	Babinkamtibmas ikut masuk dalam keanggotaan divisi anak	Akan membentuk team untuk mencari orang tua asuh untuk anak putus sekolah tingkat kecamatan
6	Adanya penjual miras terselubung di warung	Karena tidak dapat diperingatkan, maka kasus dilaporkan Pokja ke Polsek	Babinkamtibmas langsung mendatangi lokasi	Polsek langsung memanggil pemilik warung dan menyita semua minuman yang akan dijual
7	Kejahatan di jalan	Adanya pos terpadu di bundaran ITS sebagai pos komunikasi antara polisi dengan warga	Polsek sharing dengan berkoordinasi melalui pos terpadu	—

Sumber : Laporan Program COP 2005-2006, Pusmah Unair.

Berdasarkan hasil wawancara, maupun adanya informasi dari data sekunder yang telah diuraikan diatas mengenai karakteristik pelaksanaan program



COP dan penanganan masalah di Kelurahan Keputih, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program maupun pada penanganan masalah, ternyata COP tidak hanya fokus pada permasalahan kamtibmas saja tapi juga mengenai permasalahan sosial seperti, perbaikan jalan, pembuatan kartu Kipem bagi warga pendatang, memberikan bantuan bagi anak sekolah yang tidak mampu, maupun penanganan masalah mengenai anak jalanan. Terbukti Pokja COP Keputih juga telah membentuk divisi anak pada bulan November 2005 lalu.

Pelaksanaan program COP di Kelurahan Keputih dapat pula dilihat telah mendapatkan dukungan sebagian masyarakat, terutama para donatur maupun *stakeholders* yang memberikan bantuan berupa dana kepada program ini. Dalam hal ini masyarakat keputih memang membutuhkan adanya program COP yang lebih terealisasikan, didalam penanganan masalah-masalah di komunitas masyarakat. Terbukti dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pokja, yang direspon positif oleh masyarakat juga aparat.

III.1.3. Faktor Pengaruh Dan Hambatan

Dalam setiap implementasi program pasti ada faktor pendorong maupun faktor yang menjadi pengahambat. Begitu juga dengan implementasi program COP di Kelurahan Keputih ini, dimana terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor terbesar yang mempengaruhi tersebut adalah respon masyarakat atau adanya dukungan masyarakat. Hal itu dapat diketahui dari beberapa informasi yang ada di bawah ini. Menurut ketua Pokja COP di Keputih mengenai faktor pengaruh adalah sebagai berikut :



“...Respon masyarakat terhadap program ini sangat bagus, tapi pada awalnya memang ada kecurigaan warga kepada COP. Masyarakat pada awalnya menilai bahwa COP adalah SP (*spionase*) Polisi, dimana ada anggapan masyarakat seperti itu bisa menjadi hambatan bagi pelaksanaan program ini. Tapi kemudian kita melakukan berbagai tahapan sosialisasi kepada masyarakat bersama Pusham Unair dengan forum diskusi yang melibatkan polisi dan masyarakat. Dan setelah beberapa kali kita berikan pengertian akhirnya masyarakat di sini menjadi paham dan mendukung program ini. ...Namun dalam perjalanannya kita juga mengalami hambatan-hambatan kecil yang masih bisa kita tangani, yaitu mengenai sumber dana yang sangat minim dan juga SDM yang kurang secara kuantitas dan kualitas, namun untuk hal ini COP masih bisa menangani dan juga bersama dengan Pusham Unair telah melakukan beberapa pelatihan-pelatihan, seperti tanggal 14-15 kemarin di Tretes...”¹²

Berdasarkan informasi diatas, maka peneliti juga mewawancarai aktivis Pokja COP di Kelurahan Keputih mengenai faktor pengaruh yang ada, yaitu sebagai berikut:

“...Faktor pengaruh program COP terutama adalah dukungan dan komunikasi. ...Responnya warga baik semua, aparat sangat mendukung, karena kita kan juga selalu mensosialisasikan program ini lewat radio komunitas COP 104 FM. Memang saya merasakan radio ini cukup berpengaruh, karena sangat efektif mensosialisasikan COP kepada warga Surabaya terutama di Kelurahan Keputih, apalagi kita juga sering mengadakan *talk show* dengan narasumber yang kompeten, ditambah juga ada interaktif dengan masyarakat. ...Di sini semuanya hampir mendengarkan radio ini, terutama di warung-warung, biasanya malah warung-warung tempat menjual minuman keras dan tempat nongkrong para preman juga mendengar radio ini. Yang saya tahu mereka rata-rata semua senang dengan radio ini, bahkan teman-teman saya yang preman itu sering kesini *me-request* lagu, kadang-kadang mereka membawa makanan atau rokok untuk teman-teman yang lagi siaran. saya rasakan sekarang seperti itu, kalau boleh saya cerita sedikit, bahkan ada preman-preman sini yang dulu tidak suka sama saya sekarang ini kita jadi bersahabat, mereka yang dulu gondrong-gondrong sekarang rambutnya semua dipotong, yang dulu sering minum-minuman keras, sekarang sudah tidak lagi, mereka malah meninggalkan itu. ...Jadi saya benar-benar puas dengan adanya

¹² Wawancara dengan Bpk Drs. Muhtarom (Ketua Pokja COP Keputih), Tanggal 21 Juli 2006.



COP ini. Memang dengan radio ini kita mudah untuk mensosialisasikan kegiatan atau program, selain itu kita juga selalu berkomunikasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah kamtibmas yang terjadi melalui *talk show interaktif*, supaya lebih komunikatif dengan masyarakat dan masyarakat juga lebih waspada serta hati-hati, terutama mengenai masalah curanmor, perjudian, miras, dsb...”¹³

Informasi dari sumber lain juga berhasil ditemukan, yaitu dari sekretaris

Pokja COP di Keputih, informasi tersebut adalah sebagai berikut :

“...Dukungan masyarakat memang menjadi faktor yang paling penting bagi pelaksanaan program COP di Keputih, karena kita selama ini berjalan juga karena mendapatkan respon positif baik dari masyarakat di RT/RW, maupun dari kepolisian. Kita selalu memberikan pengertian dengan melalui komunikasi, sehingga program dapat berjalan, dan masyarakat juga sadar untuk berpartisipasi menjaga kamtibmas dari pencurian sepeda motor, perjudian, miras, dsb. Tidak hanya masyarakat saja yang memberikan dukungan terhadap program ini tapi juga dari aparat Kelurahan Keputih dan Polsek. ...Namun adapula hambatan yang kami rasakan, COP ini kan termasuk program bagi ranah kultur kepolisian, jadi tidak semua polisi mendukung. Karena ada beberapa polisi yang masih terbiasa dengan gaya lama kepolisian, seperti menarik uang yang tidak resmi saat pengurusan surat SKCK, SIM, STNK, dan masih bertindak represif pada warga. Dengan adanya program ini jadi ada beberapa polisi yang merasa terusik karena sudah mendapatkan pencaharian melalui cara-cara lama seperti menilang, meminta biaya pengurusan surat secara pribadi, dsb. Jadi masalah hambatan ini memang butuh proses tidak bisa singkat. ...Selain itu menurut saya juga belum adanya standart pelayanan minimum (SPM) bagi aparat birokrasi juga menjadi faktor pengaruh, yaitu seperti waktu mengurus pembuatan surat-surat di kantor kepolisian, masyarakat harus menunggu waktu yang lama dengan biaya yang dikeluarkan berbeda-beda (tidak ada standarisasi biaya). *Performance* (penampilan), pelayanan aparat pemerintahan dan kepolisian juga dirasa masih kurang memuaskan masyarakat. ...Selain itu yang menjadi hambatan lainnya adalah sumber daya manusia, memang kita juga memerlukan keahlian-keahlian terutama untuk bisa menjadi mediator, mengerti tentang hukum, mengerti birokrasi, agar bisa membantu dalam pelaksanaan

¹³ Wawancara dengan Mas Khusnul Hidayat (Koordinator Radio COP & anggota Pokja COP Keputih), Tanggal 15 Juli 2006.



program. Namun dalam hal ini kita masih terus mengupayakan pelatihan-pelatihan, workshop bagi para aktivis Pokja...¹⁴

Dari berbagai uraian diatas terlihat bahwa dalam pelaksanaan program COP masih terdapat banyak hambatan, selain adanya faktor pengaruh. Untuk faktor pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan program COP di Keputih ini adalah adanya dukungan masyarakat yang sangat besar dan juga adanya komunikasi yang interaktif melalui radio.

Dukungan masyarakat ini telah menjadi faktor pendorong Pokja COP Keputih dalam setiap melakukan kegiatannya. Seperti yang telah dikemukakan diatas, yaitu dalam melakukan kegiatan penyuluhan/himbauan dan diskusi mengenai masalah curanmor, perjudian, miras dan narkoba ke RT/RW. Selain itu juga melakukan kegiatan pendataan penduduk bagi pendatang, kegiatan pemberian bantuan kepada anak sekolah yang kurang mampu, dsb yang juga bisa berjalan atas dukungan masyarakat.

Sedangkan faktor komunikasi dinilai juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program COP seperti yang telah disebutkan diatas. Terdapatnya radio komunitas COP di Kelurahan Keputih telah dinilai sangat efektif membantu mensosialisasikan program ataupun didalam membahas masalah kamtibmas kepada masyarakat. Apalagi dengan adanya *talk show* oleh narasumber yang kompeten, selain itu juga ada program interaktif kepada masyarakat sekitar.

Sedangkan untuk hambatan yang bisa disimpulkan dari uraian diatas adalah mengenai struktur birokrasi, yang dinilai belum adanya keseragaman

¹⁴ Wawancara dengan Bpk Soegiyono B.A (Sekretaris Pokja COP Keputih & Ketua Asosiasi Pokja COP Surabaya), Tanggal 22 Juli 2006.



terutama pada standart pelayanan minimum (SPM) atau prosedur-prosedur kerja ukuran dasar yang sering juga diistilahkan *Standart Operating Procedures (SOP)*. Selain itu juga sumber daya manusia yang sangat minim dalam hal kualitas dan kuantitas menjadi hambatan untuk setiap melakukan kegiatan-kegiatan. Terbukti Pokja Keputih masih terus melakukan pelatihan-pelatihan melalui *workshop*.

III.1.4. Dampak / Output Setelah Ada Program COP

Untuk melengkapi informasi mengenai implementasi COP di Kelurahan Keputih, maka selanjutnya penting juga untuk diketahui mengenai dampak atau *output* setelah adanya program COP di wilayah tersebut. Seperi apa dampaknya, berikut adalah informasi dari beberapa sumber :

Menurut Ketua Pokja COP Keputih dampak setelah adanya COP adalah sebagai berikut :

“...Setelah ada program COP di Keputih, masalah kamtibmas semakin menurun, masyarakat kebanyakan sudah sadar tentang hukum, tentang masalah sosial, masalah kamtibmas dsb. Karena kita juga sering mengadakan forum-forum diskusi dengan seluruh elemen masyarakat dan pelatihan-pelatihan. Dampak yang nyata adalah sekarang ini hampir tidak ada perjudian, minum-minuman keras, pencurian sepeda bermotor juga sudah berkurang dibanding sebelum ada COP...”¹⁵

Sedangkan menurut Lurah Keputih, dampak adanya program COP yang dirasakan adalah :

“...Adanya COP banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Keputih, khususnya bagi aparat kelurahan. Kita sangat terbantu dengan hadirnya COP, karena kalau boleh saya bilang daerah Keputih ini termasuk daerah yang rawan tindak kejahatan, karena

¹⁵ Wawancara dengan Bpk Drs. Muhtarom (Ketua Pokja COP Keputih), di Jl Keputih Gang III No46, Tanggal 21 Juli 2006.



lokasinya yang dipinggir kota, juga di daerah ini masih terdapatnya kesenjangan antara warga asli dan pendatang. Selain itu daerah Keputih ini banyak terdapat kampus, yang akhirnya banyak kos-kosan disekitarnya. Hal itu berakibat banyaknya penduduk musiman atau mahasiswa yang tinggal tapi tidak terdata oleh kami. ...Namun setelah ada COP ini kita bisa terbantu dalam menangani masalah penduduk. COP telah membantu kita untuk mendata penduduk terutama di areal yang padat kos-kosan dan juga untuk pembuatan Kipem. Sekarang ini berbagai permasalahan kamtibmas saya kira semakin menurun..."¹⁶

Sekretaris Pokja COP Keputih juga menambahkan mengenai dampak yang timbul dalam masyarakat setelah adanya implementasi program COP, yaitu sebagai berikut :

"...Dampaknya program COP ini menurut saya memang telah terjadi perubahan. Perubahan yang nyata itu adalah : (1) Masalah perbaikan jalan yang rusak, yang kita buat surat ke Pemkot dan DPRD (dengan ditandatangani seluruh ketua RW, Kapolsek, Lurah), dan sekarang jalannya sudah diperbaiki semua. (2) Masalah tempat pembuangan sampah akhir yang diprotes warga karena menimbulkan bau busuk, yang juga sudah kita selesaikan dan akhirnya TPA dipindahkan di daerah Tandes. (3) Aparat kepolisian yang sekarang sudah mau turun ke masyarakat, dimana program ini kita selalu melibatkan pihak polisi dalam setiap pertemuan maupun diskusi mengenai masalah kamtibmas. (4) Perjudian sudah tidak nampak seperti dulu, seperti judi togel, billiard, dingdong. (5) Miras juga sudah jarang ditemui di warung-warung pojok, dibandingkan sebelum ada COP angkat banyak dijual di warung-warung kecil. (6) Berhasilnya diungkap kasus pembunuhan, kita bekerjasama dengan Polsek mencari pelakunya, dan akhirnya satu hari setelah kejadian 4 orang pelakunya yang sedang mabuk berhasil di bekuk. Jadi banyak sekali menurut saya dampaknya setelah ada program COP di Kelurahan Keputih..."¹⁷

Selain itu menurut anggota Pokja sekaligus pengurus Radio COP juga memberikan informasi yang hampir sama mengenai dampak atau *output*, yang dirasakan setelah adanya program COP ini, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Wawancara dengan Bpk Badjuri S.H (Lurah Keputih), Tanggal 17 Juni 2006.

¹⁷ Wawancara dengan Bpk Soegiyono B.A (Sekretaris Pokja COP Keputih & Ketua Asosiasi Pokja COP Surabaya), Tanggal 22 Juli 2006.



“...Dampak atau outputnya program COP ini banyak mas, sekarang ini di Keputih (sekitar lima bulan terakhir) pencurian sepeda motor hampir tidak ada, biasanya hampir satu bulan terjadi 5 kali bahkan 7 kali pencurian sepeda motor. Penjual maupun yang minum-minuman keras sekarang juga hampir tidak ada, perjudian juga sama, judi togel, judi adu dara yang dulu ramai sekarang ini sudah jarang ditemui atau sangat berkurang di banding dulu. Coba saja mas liat biasanya di pojok kampung ini ada saja judi dan minum-minuman keras yang dijual tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Selain itu preman-preman di sini mas sudah berubah perilaku menjadi lebih baik, ya kadang-kadang sering membawakan teman-teman yang lagi siaran dengan makanan ya rokok. Yang dulu teman saya gondrong-gondrong sering juga mabuk dan judi sekarang sudah tidak lagi. Bahkan yang dulu pernah jahat sama saya sekarang malah kita jadi ‘CS’. ...Dampak lainnya yang terasa yaitu sekarang ini polisi sudah mau duduk bareng bersama warga disini membahas masalah kamtibmas, dsb. Bahkan sering ngobrol-ngobrol dengan warga seperti tidak ada jarak lagi, sangat beda bila dibandingkan dulu...”¹⁸

Berdasarkan triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti, informasi tersebut dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang sekaligus sebagai Sekretaris Lurah Keputih. Dari hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Selama lebih dari dua tahun ini yang bisa dirasakan ya itu tadi mas, berkurangnya curanmor, perjudian sudah tidak ada, miras yang biasa di warung-warung sudah tidak ditemui. Polisi semakin lebih dekat dengan warga, karena ya dari seringnya diskusi dan pertemuan yang dilakukan COP. Dari pertemuan tersebutkan semua dalam satu forum, jadi kita setara antara polisi dan masyarakat, karena kita bersama juga mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan kamtibmas yang ada...”¹⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh masyarakat Keputih yang sekaligus menjadi sekretaris Pokja Keputih, yaitu sebagai berikut :

“... Sejak adanya COP ini dapat dilihat perubahannya dalam masyarakat, antara lain sudah tidak ditemui lagi perjudian, seperti

¹⁸ Wawancara dengan Mas Kusnul Hidayat (Koordinator Radio COP & anggota Pokja COP Keputih), Tanggal 15 Juli 2006.

¹⁹ Wawancara dengan Bpk Drs Suparman (Sekretaris Lurah Keputih), Tanggal 18 Juli 2006.



judi togel, dingdong, dan judi billiard. Selain itu miras juga sudah tidak ada yang menjual...²⁰

Dari berbagai uraian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa implementasi program COP di Kelurahan Keputih ini telah membawa dampak yang positif. Terbukti dengan tidak ditemuinya lagi masalah-masalah kamtibmas seperti perjudian, miras, dan narkoba yang dulu sempat marak beredar. Maraknya pencurian sepeda motor juga semakin berkurang.

Selain itu dampak yang dirasakan juga yaitu adanya keharmonisan hubungan antara polisi dengan masyarakat dalam suatu forum. Juga sudah adanya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama bertanggungjawab menjaga kamtibmas di wilayah Kelurahan Keputih.

III.2. IMPLEMENTASI COP DI KELURAHAN KLAMPIS NGASEM

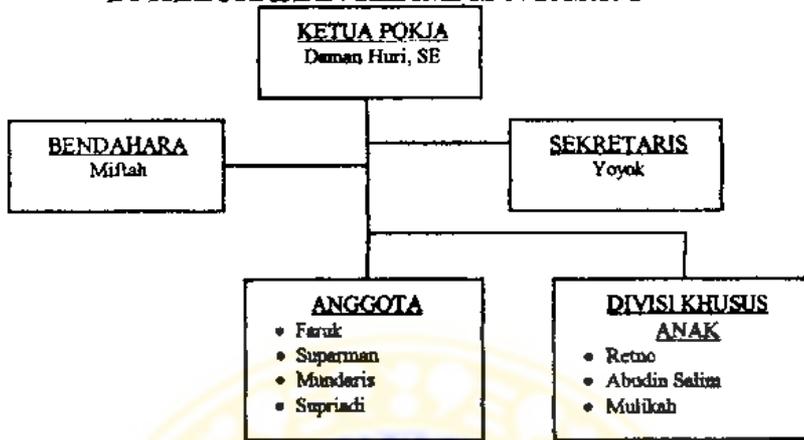
III.2.1 Struktur Pengorganisasian Dan Proses Pembentukan Pokja

Kelurahan Klampis Ngasem merupakan salah satu wilayah *pilot-project* pada awal program COP di Kota Surabaya. Di Kelurahan Klampis Ngasem terdapat pula Pokja COP yang diketuai oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan seorang bendahara, juga memiliki 4 anggota, selain itu juga terdapat divisi khusus anak yang terdiri dari 3 orang anggota. Untuk lebih jelasnya berikut adalah susunan anggota Pokja COP di Kelurahan Klampis Ngasem :

²⁰ Wawancara dengan Bpk Soegiyono B.A (Sekretaris Pokja COP Keputih), Tanggal 21 Juli 2006.



**BAGAN III.2
STRUKTUR KEANGGOTAAN POKJA COP
DI KELURAHAN KLAMPIS NGASEM**



Sebelum peneliti mulai mencari sumber informasi mengenai pelaksanaan COP di Kelurahan Klampis Ngasem, peneliti terlebih dahulu mencari sumber melalui data sekunder yang ada tentang proses pembentukan Pokja COP di Kelurahan Klampis Ngasem, yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan program COP di Kelurahan Klampis Ngasem ini diawali dengan riset partisipasi berupa diskusi-diskusi terfokus atau FGD (*focus group discussion*) yang melibatkan polisi dan masyarakat. Proses FGD diakhiri dengan pengidentifikasian masalah, pembuatan prioritas masalah dan pembentukan kelompok kerja (Pokja). Pokja yang terbentuk dilengkapi pengurus dan rencana kerja. Selain itu di bangun penguatan solidaritas dan motivasi melalui program-program studi banding, siaran radio, diskusi publik di televisi, pelatihan, pembuatan poster, stiker, penerbitan buletin Sorot, dsb.”²¹

Berdasarkan informasi tersebut peneliti juga melakukan perbandingan langsung di lapangan, dengan mewawancarai Ketua Pokja COP Klampis Ngasem, untuk mengetahui mengenai awal pembentukan Pokja COP ini di Kelurahan Klampis Ngasem. Dan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

²¹ Leaflet COP Reformasi, Demokrasi dan Partisipasi, Pokja Sukolilo, Jl. Arief Rahman Hakim No.2A.

COP, dan solusi permasalahan, apakah perlu adanya program COP?, yaitu sebagai jembatan antara masyarakat dan polisi. ...Dalam hal ini saya terangkan bahwa COP bukan instansi baru ataupun organisasi yang menyaingi instansi atau organisasi lain, dan juga bukan seperti hansip, satpam atau siskamling, tidak seperti itu. COP disini adalah lebih pada membahas akar masalahnya, dan mencari bagaimana solusinya penaganannya. ...Maka setelah 3 kali pertemuan kita menyepakati di bentuknya Pokja. dan saya yang dipercayakan teman-teman untuk mengetuai Pokja COP di Kelurahan Klampis Ngasem...²²

Selain itu peneliti juga berhasil mewawancarai salah satu anggota Pokja COP di Klampis Ngasem mengenai proses awal saat pembentukan Pokja. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Awal pembentukan COP di Klampis Ngasem ini karena daerah ini dianggap rawan sekali terjadi permasalahan kamtibmas, antara lain di sini banyak terdapat kampus, kos-kosan, kompleks perumahan, pertokoan dan banyak warga pendatang, yang pada akhirnya rawan terjadi pencurian terutama pencurian sepeda motor. Kemudian disini diadakan forum yang di fasilitasi oleh Pusham Unair, yang menghadirkan seluruh elemen masyarakat antara lain tokoh-tokoh masyarakat (Lurah, ketua RW/RT), tokoh agama, dan juga polisi (Babinkamtibmas). ...Beberapa kali pertemuan akhirnya forum menyepakati di bentuk Pokja di Kelurahan Klampis Ngasem...²³

²² Wawancara dengan Bpk Damanhuri S.E (Ketua Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 11 Juli 2006.

²³ Wawancara dengan Bpk Soepriyadi Aiptu (anggota Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 20 Juli 2006.

tanggal 25 November 2005, jadi saya kurang tahu bagaimana Pokja COP dan proses pembentukannya. Setahu saya waktu itu pernah ada semacam workshop COP, dan dari pihak Kelurahan diundang, namun yang berangkat kesana adalah staf saya dua orang dari Kesra. Dan juga COP setahu saya pernah mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali di Kelurahan Keputih, namun saya tidak bisa hadir dan diwakilkan...²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum terbentuknya Pokja, di Kelurahan Klampis Ngasem telah mengadakan forum diskusi atau diistilahkan dengan sebutan FGD, yang dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Dimana dalam forum tersebut diagendakan mengenai sosialisasi program, pemetaan masalah, dan mencari solusi. Pembentukan Pokja tersebut juga melibatkan dari beberapa elemen masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, Camat, Lurah, Kapolsek, tokoh pemuda, PKK, dan warga lainnya.

III.2.2. Karakteristik Implementasi Program COP & Penanganan Masalah

Kelurahan Klampis Ngasem merupakan daerah salah satu *pilot-project* program COP di Kota Surabaya. Daerah ini memiliki beberapa karakteristik permasalahan kamtibmas antara lain seringnya terjadi pencurian sepeda motor,

²⁴ Wawancara dengan Bpk La Koli S.Sos (Lurah Klampis Ngasem), Tanggal 13 Juli 2006.

Mengenai implementasi program COP dan penanganan masalah yang ada di Kelurahan Klampis Ngasem, berikut adalah informasi yang didapat dari ketua Pokja COP.Klampis Ngasem :

“...Pelaksanaan program COP di wilayah Klampis Ngasem ini sangat bagus sekali karena berusaha mengatasi permasalahan kamtibmas yang ada di sini dengan melihat akar permasalahannya sebelum di bawa ke kantor polisi. Tapi apabila sudah menyerempet mengenai tindak kriminalitas dan masalah hukum, kita menyerahkan permasalahan itu kepada polisi, karena kita tidak memiliki wewenang yang lebih. Namun saat sudah di polisi tim COP masih tetap mengawasi bagaimana proses hukumnya, jadi apabila tersangka terbukti bersalah lalu dibebaskan (terjadi ketidakadilan/kecurangan dari oknum polisi) maka kita bisa mengkritisi itu dan melapor keatasan kepolisian yang mempunyai wewenang lebih, lalu mempertanyakannya...”²⁶

Agar mengetahui lebih dalam mengenai implementasi program COP dan karakteristik masalah yang ada di Kelurahan Klampis Ngasem, maka peneliti mewawancarai sumber lain yaitu sebagai berikut :

“...Dalam pelaksanaannya kita selalu mencari akar permasalahan yang ada, yaitu dengan dibuat forum, kemudian baru dicari solusinya dan kita tindak lanjuti. Setelah itu yang kita lakukan adalah himbauan-himbauan lewat RT,RW maupun lewat media seperti radio COP, majalah Sorot, dan Pokja juga menyebarkan stiker dan poster mengenai himbauan kepada masyarakat supaya hati-hati terhadap pencurian sepeda motor, bahaya narkoba, dsb...”²⁷

Berdasarkan keterangan informan lainnya mengenai masalah kamtibmas yang ada di Kelurahan Klampis Ngasem, adalah sebagai berikut:

²⁵ Laporan Program Community Oriented Policing, Maret-Agustus 2005, Pusham Unair, Surabaya 2005.

²⁶ Wawancara dengan Bpk Damanhuri S.E (Ketua Pokja Klampis Ngasem, dan Sekretaris Asosiasi COP Kota Surabaya), Tanggal 11 Juli 2006.

²⁷ Wawancara Bpk Drs. Suparman (anggota Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 23 Juni 2006.

banyak sekali kos-kosan jadi pernah terjadi kasus pasangan yang tinggal secepat tanpa adanya surat nikah. Dan yang rawan terjadi di sini adalah pencurian sepeda motor terutama di areal kampus dan kos-kosan tersebut. Perjudian burung dara juga ada di daerah Klampis Ngasem ini, lalu kita mencari solusinya bersama RT, RW, maka yang kita lakukan adalah himbauan kepada warga untuk penurunan rumah burung dara (bekupon) supaya tidak melebihi atap rumah. ...Selain itu juga pernah terjadi masalah pemadaman lampu jalan di jalan Klampis Semalang III, karena warga tidak mampu membayar penerangan jalan. Pokja juga memfasilitasi masalah itu dengan membawa masalah ke Dinas Pertamanan dan Peukot...²⁸

Informasi mengenai penanganan masalah di Pokja Klampis Ngasem

lainnya juga didapati sebagai berikut :

...Kita selalu berusaha memfasilitasi segala penyelesaian masalah yang ada dalam masyarakat, tidak hanya kamtibmas saja tapi juga masalah sosial. Seperti juga yang baru-baru ini yaitu adanya warga yang keberatan dengan program penkot 'satu jiwa satu pohon', yang sangat potensial menjadi lahan pungli, yaitu dengan dimintai uang Rp.20.000-Rp.30.000 sebagai pengganti harga satu pohon kepada warga. Maka permasalahan itu sudah kita bawa ke Dewan dan Pemkot. Tidak lama setelah itu langsung direspon oleh Pak Walikota dengan memanggil semua Lurah. ...Kami (COP) meminta supaya program itu dihapuskan karena tidak sesuai dengan pasal 27 dan pasal 28 UU Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak, yang menjelaskan bahwa akte kelahiran merupakan hak seorang anak, dan negara berkewajiban untuk memenuhinya...²⁹

Berdasarkan informasi diatas, ternyata ada kasus mengenai sajisapo.

Untuk mendapatkan informasi secara dua arah maka peneliti juga mewawancarai Lurah Klampis Ngasem sebagai aparat untuk membandingkan kebenaran mengenai adanya masalah tersebut yang telah diberitakan ketua Pokja sebelumnya. Dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

²⁸ Wawancara Bpk Yoyok (Sekretaris Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 13 Juli 2006.

²⁹ Wawancara Bpk Daman Huri S.E (Ketua Pokja Klampisngasem, dan Sekretaris Asosiasi COP Kota Surabaya), tanggal 13 Juli 2006.

“...Memang baru-baru ini pernah timbul permasalahan tentang Instruksi Walikota Surabaya No.11 Tahun 2005 tentang kewajiban ‘sajisapo’ (satu jiwa satu pohon) bagi setiap penduduk yang lahir, dan warga yang pindah ke Surabaya. Waktu itu kita sempat kaget karena ada surat dari Pak Walikota yang isinya melarang keras adanya pemerasan sajisapo kepada warga. Aparat kita juga dikagetkan dengan adanya berita di koran Memo dengan judul ‘temuan COP’ dimana diberitakan bahwa ada 10 Kelurahan yang pernah meminta uang kepada warganya, termasuk Kelurahan Klampis Ngasem. ...Saya sebagai Lurah sangat menyayangkan sekali tindakan COP seperti itu tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada kami, karena berita itu tidak benar. Setelah itu saya langsung mencoba menghubungi Pak Damanhuri untuk menanyakan untuk meminta penjelasan, dan responnya ternyata berita itu tidak benar, 10 Kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan yang ada COP-nya bukan seperti apa yang diberitakan. Tapi bagaimana menurut saya berita itu sudah beredar luas di masyarakat. Jadi menurut saya bagaimanapun juga ya COP masih baru jalinlah kerjasama yang baik dengan pihak kelurahan, karena kelurahan yang tahu tentang masyarakatnya, jangan membuat *statement-statement* yang merugikan seperti itu. Jadi komunikasi dan koordinasi memang penting. Dan kita akan mendukung program itu apabila kita dilibatkan...”³⁰

Mengenai adanya masalah tersebut juga dibenarkan oleh ketua Asosiasi Pokja COP. Informasinya adalah sebagai berikut :

“...Benar kita pernah mengadakan masalah ini ke dewan, namun kita tidak ada niatan untuk mempublikasi berita ini di media massa, apalagi dengan maksud mebesar-besarkan nama COP dan menjelek-jelekan 10 nama kelurahan yang disebut, ya termasuk kelurahan Klampis Ngasem. ...Ceritanya begini kita pada saat itu habis menyelenggarakan pertemuan atau seminar mengenai masalah perlindungan anak di hotel Sahid. Dan pada saat itu banyak peserta yang mengadakan mengenai ‘sajisapo’. Memang sebelumnya kita juga pernah mendengar keberatan warga mengenai instruksi walikota Surabaya No.11 tahun 2005 tersebut tentang kewajiban satu jiwa satu pohon bagi setiap penduduk yang lahir, dan warga yang pindah ke Surabaya. ...Maka setelah kita selesai di hotel Sahid, kita ya dengan massa yang cukup banyak langsung menyampaikan masalah ini ke Dewan. Namun kita juga tidak tahu setibanya di gedung DPRD Kota Surabaya, kita sudah ditunggu oleh wartawan. Jadi setelah kita bertemu dewan yang sudah

³⁰ Wawancara dengan Bpk La Koli S.Sos (Lurah Klampis Ngasem), Tanggal 13 Juli 2006.

berjanji menindaklanjutinya ke Pemkot, kita juga harus melayani wartawan. ...yang saya beritakan adalah 10 kelurahan itu merupakan kelurahan yang ada Pokjanya, tapi wartawan kemudian menulisnya masalah pungli sajisapo ini ada di 10 kelurahan itu, karena saya memang tidak menyebutkan kelurahan mana yang melakukan pungli...³¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ternyata benar ada kasus mengenai 'satu jiwa satu pohon' di Kelurahan Klampis Ngasem, dimana warga merasa keberatan karena bagi yang tidak sempat membawa sebatang pohon dapat menggantinya dengan uang sebesar Rp.20.000-Rp.30.000. Dan dari Pokja COP Klampis Ngasem juga menilai program itu tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, lalu mengadukannya ke dewan. Namun yang terjadi adalah pemberitaan di berbagai koran yang mengatakan 10 kelurahan telah melakukan pungutan liar (pungli). Maka hal tersebut yang membuat aparat Kelurahan Klampis Ngasem sempat mempertanyakannya kepada Pokja..

Dari wawancara tersebut dapat dilihat pihak kelurahan memang masih merasakan kurangnya komunikasi antara Pokja dengan aparat kelurahan, sehingga terjadi berita-berita yang kurang benar, seperti program 'satu jiwa satu pohon' yang mengatakan bahwa di Kelurahannyanya telah terjadi 'pungli'. Namun berdasarkan wawancara tersebut Pokja COP telah mengkonfirmasi kepada pihak Kelurahan Klampis Ngasem tentang informasi yang sebenarnya. Berikut adalah pernyataan dari ketua Pokja klampis Ngasem :

"...Saya sudah mengkonfirmasi pada pihak kelurahan mengenai berita yang sebenarnya. Saya sendiri menyangkan saat berita tersebut muncul di koran Memo pada tanggal 1 Juni 2006, yang menyebutkan 10 kelurahan terbukti melakukan pungli. Karena hal

³¹ Wawancara dengan Bpk Drs. Muhtarom (Ketua Asosiasi COP Surabaya & Sekretaris Pokja Keputih), Tanggal 21 Juli 2006.

tersebut mungkin bisa berakibat lurahnya akan diberikan peringatan atau sanksi oleh pak walikota. ...Ya sebenarnya kita siap untuk melakukan konferensi pers apabila masalah ini semakin runcing, tapi selama ini tidak ada tuntutan atau apapun itu kepada kami. Jadi kami hanya cukup menjelaskan saja kepada 10 kelurahan tersebut...³²

Selain adanya permasalahan itu, peneliti juga mencari informasi lainnya mengenai implementasi program COP di Kelurahan Keputih. Dan beberapa informasi yang didapat lainnya adalah sebagai berikut :

“...Pelaksanaan program COP di Klampis Ngasem ini kita sering mengadakan forum minimal 1 bulan sekali. Dalam forum itu mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, aparat kelurahan, ketua RT/RW, polisi untuk membicarakan permasalahan yang ada terutama di Kelurahan Klampis Ngasem ini, kemudian kita bersama mencarikan solusinya. ...Permasalahan itu seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, curanmor, judi, miras, maupun keluhan-keluhan warga lainnya terhadap birokrasi, dsb. ...Dalam pengambilan keputusannya kita melalui forum, disini pengambilan keputusan adalah mengedepankan prinsip kesetaraan jadi ketua Pokja tidak berhak mengambil keputusan sendiri. Kita melibatkan semua elemen masyarakat juga kepolisian, karena kita tidak mungkin menyelesaikan permasalahan kamtibmas sendiri begitupun polisi, jadi kita selalu berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk menangani masalah tersebut...³³

Hasil wawancara dengan Ketua COP Klampis Ngasem tersebut juga dibenarkan salah seorang aparat kepolisian dari Polsek Sukolilo. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Untuk program COP ini pihak kepolisian memang terlibat, terutama yang ditugaskan untuk COP adalah anggota dari Babinkamtibmas Polsek Sukolilo. Babinkamtibmas ini yang langsung berhadapan dengan Pokja COP maupun masyarakat di sini. Teman-teman dari COP sendiri sering mengundang kami didalam diskusi maupun pertemuan dengan warga, jadi kita sudah

³² Wawancara dengan Bpk Daman Huri S.E (Ketua Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 13 Juli 2006.

³³ Wawancara dengan Bpk Yoyok (Sekretaris Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 13 Juli 2006.

banyak tahu mengenai bagaimana COP. ...Menurut saya COP itu cukup jelas perannya dapat membantu kita sebagai aparat kepolisian, jadi apabila ada masalah kecil dalam masyarakat bisa diselesaikan dahulu oleh masyarakat itu sebelum di laporkan ke kantor polisi. Pelaksanaan program COP juga saya rasa tidak hanya mengenai masalah keamanan, tapi sosial ataupun mengkritisi pelayanan kepolisian (birokrasi). Hal ini jelas membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan kepolisian, jadi masyarakat disini juga ikut bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban, dan kepolisian juga terdorong dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ...³⁴

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pokja COP di Klampis Ngasem tidak hanya mengatasi permasalahan kamtibmas saja tapi juga mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan juga mengkritisi berbagai pelayanan aparat, terbukti dengan adanya penyelesaian masalah pemadaman lampu, masalah satu jiwa satu pohon, selain itu juga adanya bentuk bantuan bagi anak sekolah dan sosialisasi perlindungan hak anak dengan dibentuknya divisi anak

Sebagai langkah memperkuat dan menyesuaikan data yang ada di Kelurahan Klampis, maka peneliti menambahkan informasi tersebut melalui data-data sekunder yang ada, yaitu sebagai berikut :

³⁴ Wawancara dengan Sugianta Aiptu (Babinkamtibmas Polsek Sukolilo), di Polsek Sukolilo, Tanggal 20 Juli 2006.



TABEL III.2
HASIL TINDAK LANJUT MASALAH KAMTIBMAS DI POKJA COP
KELURAHAN KLAMPIS NGASEM TAHUN 2005-2006

No	Permasalahan	Penyelesaian	Tanggapan Polisi	Hasil
1	Maraknya perjudian burung dara	Penurunan rumah burung dara (bekupon) di beberapa tempat dan disepakati tinggi bekupon tidak boleh lebih dari tinggi rumah	Berkoordinasi pada saat diadakannya forum serta saat ada penurunan bekupon oleh warga	Aktivitas judi burung dara berkurang di kelurahan Klampis Ngasem
2	Tingginya tingkat curanmor	Penertiban dengan menempel stiker dan poster tentang pencurian kendaraan bermotor di rumah warga dan kos-kosan	Merespon positif dan Polsek membuat spanduk tentang pencurian dan tentang himbuan pemasangan kunci ganda pada motor	Laporan pencurian motor berangsur berkurang dan sekarang tidak ada
3	Banyaknya penduduk musiman yang tidak terdata	Pembuatan formulir pendataan anak kos bersama Polsek Sukolilo di wilayah Klampis	Berkoordinasi dengan Pokja untuk mendata ulang penduduk musiman	Dua RW sudah tertata dan terdata rapi mengenai informasi anak kos
4	Penduduk pendatang kurang aktif dalam kegiatan masyarakat	Pembuatan kuesioner yang disebar kepada penghuni kos	---	Program sedikit ada kendala dalam hal proses pengumpulan karena bertepatan dengan waktu liburan
5	Banyaknya anak putus sekolah dan bekerja di perempatan <i>trafic light</i>	Dibentuknya divisi anak pada bulan Juni 2004	Babinkamtibmas ikut masuk dalam keanggotaan divisi anak	Akan membentuk team untuk mencari orang tua asuh untuk anak putus sekolah tingkat kecamatan
6	Ditangkapnya seorang pembunuh yang sedang mabuk di daerah klampis	Pokja menangkap dan mengamankan pelaku sebelum dihakimi oleh warga dan langsung dilaporkan ke Polsek	Secepat mungkin meluncur ke lokasi kejadian dan memproses kasus tersebut	Pelaku tertangkap, anggota Pokja berani dan bersedia menjadi saksi kasus ini

Sumber : Laporan Program COP 2005-2006, Pusham Unair.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat terdapat berbagai permasalahan kamtibmas maupun permasalahan sosial yang diatasi oleh Pokja COP Klampis Ngasem. Hal tersebut tidak lepas dari kerjasama antara Pokja COP, aparat kelurahan dan kepolisian khususnya Polsek Sukolilo. Dari data ini maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peranan COP dalam membantu tugas kepolisian Polsek Sukolilo pada khususnya, dan juga ingin mengetahui mengenai koordinasinya. Untuk informasi lebih jauh mengenai masalah tersebut, maka berikut adalah keterangan dari Ketua Pokja COP Klampis Ngasem :



“...COP merupakan salah satu strategi untuk mengurangi tindak kejahatan maupun permasalahan kamtibmas lainnya, jadi COP itu bukan instansi baru dan tidak menyaingi instansi lain. COP tidak sama dengan Hansip, Satpam, atau siskamling, COP perannya lebih pada membahas akar permasalahan dan mencari solusinya melalui forum, dengan mengajak seluruh elemen masyarakat (RT, RW, Lurah, Camat, Kapolsek (Binmaspol), dan COP akan memfasilitasi keinginan masyarakat tersebut asalkan bisa membawa manfaat bagi masyarakat pasti akan kita bantu...”³⁵

Dari informasi diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan setiap kegiatannya COP juga melibatkan setiap elemen masyarakat termasuk aparat dari kelurahan dan Polsek. Hal tersebut terbukti dengan laporan-laporan dari warga yang langsung ditanggapi oleh COP. Dan apabila masalah tersebut sangat besar baru berkoordinasi dengan pihak yang berwenang antara lain aparat kepolisian Polsek Sukolilo. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa peran COP juga membantu meringankan tugas yang ada pada aparat.

III.2.3. Faktor Pengaruh Dan Hambatan

Dalam implementasi program COP di Kelurahan Klampis Ngasem, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terutama struktur birokrasi, dan komunikasi. Berdasarkan dari data sekunder yang menjadi hambatan implementasi program COP di Klampis Ngasem adalah apabila ada pertemuan para pembuat kebijakan baik Camat, Lurah atau Kapolsek jarang turun langsung kelapangan, tapi selalu diwakilkan. Jadi seringkali masukan warga kurang didengar oleh para pembuat kebijakan tersebut, dan akhirnya cenderung hanya

³⁵ Wawancara dengan Bpk Daman Huri S.E (Ketua Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 13 Juli 2006.



memberikan pengarahan kepada warga tanpa adanya bukti nyata atau tindak lanjutnya.³⁶

Informasi yang diperoleh dari data sekunder diatas tidak dibenarkan sepenuhnya oleh salah seorang anggota Pokja COP Klampis Ngasem, yang informasinya adalah sebagai berikut :

“...Kelurahan sudah mendukung program COP ini terbukti adanya pertemuan yang difasilitasi oleh aparat kelurahan di balai kelurahan. Begitupun kepolisian Polsek Sukolilo, setiap kali ada pertemuan selalu hadir. Dalam pertemuan tersebut memang Lurah dan Kapolsek tidak selalu ada saat pertemuan, namun saya melihat Lurah maupun Kapolsek telah memberikan sinyal positif bagi program ini, terbukti saat kita ada kegiatan seperti diskusi, *workshop*, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya pihak Kelurahan dan Polsek selalu mendelegasikan stafnya untuk menghadiri kegiatan tersebut, dan hasilnya akan disampaikan. ...Yang sering diturunkan yaitu staf dari Kesra Kelurahan dan Babinkamtibmas dari Polsek. Kalau untuk Camat kita memang jarang melibatkan langsung dalam pertemuan-pertemuan di lingkup Kelurahan, dimana hanya kita cukup mengundang kelurahan maupun dari Babinkamtibmas. Namun bukan berarti tidak ada koordinasi atau komunikasi dengan Kecamatan, kita tetap berkoordinasi terutama untuk kegiatan yang lebih besar seperti studi banding, ataupun seminar kita selalu mengundang Camat. Yang saya ketahui Camat Sukolilo juga telah mendukung program ini dan telah menyatakan apapun yang bisa dibantu akan dibantu seperti perijinan tempat, maupun dana...”³⁷

Sedangkan informasi lainnya untuk hambatan serta faktor yang mempengaruhi implementasi program COP menurut ketua Pokja COP di Klampis Ngasem, adalah sebagai berikut :

“Yang menjadi hambatan adalah saat proses sosialisasi program, masyarakat masih belum tertarik, malah cenderung curiga COP sebagai *spionase* polisi. Selain itu setiap awal pertemuan telah menjadi penghakiman kepada aparat kepolisian. Ya saat itu kita belum memiliki dukungan masyarakat. ...Dukungan adalah faktor

³⁶Laporan Program Community Oriented Policing, Maret-Agustus 2005, Pusham Unair, Surabaya.

³⁷ Wawancara dengan Mas Nouvli Bernado S (Field Officer Pusham Unair untuk Pokja Klampis Ngasem), Tanggal 23 Juli 2006.

yang penting, baik dari masyarakat, maupun dari aparat. Karena awal terbentuknya Pokja COP di Klampis Ngasem adalah karena timbul dukungan dari masyarakat yang besar dalam menjaga kamtibmas maupun dalam mendukung reformasi kepolisian. ...Komunikasi juga menjadi faktor pengaruh, karena apabila tidak adanya komunikasi yang terbuka antara masyarakat dengan polisi maka program ini tidak berjalan sesuai tujuan. Maka dalam hal ini kita juga melakukan sosialisasi program. ...Selain itu sumber daya juga menjadi faktor pengaruh, untuk SDM, COP masih sering mengadakan pelatihan bagi anggota (terutama pelatihan dalam mencari akar masalah, untuk bisa menjadi fasilitator, dsb). Selain itu masalah dana juga seperti dalam mengadakan pertemuan, saat ini kita masih dompleng di tempat RW (fasilitas kurang)...³⁸

Berdasarkan informasi diatas, peneliti juga mewawancarai sumber lainnya. Dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Faktor penting bagi implementasi program ini menurut saya adalah peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, tanpa adanya itu program ini tidak bisa berjalan. Juga ya masalah sumber dana karena Pusham/TAF tidak selamanya memberikan bantuan jadi diharapkan COP kedepannya bisa mandiri (swadaya) atau bisa melibatkan para pengusaha atau *stakeholders*...³⁹

Berdasarkan beberapa informasi diatas dapat diketahui di Pokja COP Klampis Ngasem faktor komunikasi antara warga atau antara warga dengan aparat, dukungan masyarakat, dan dana merupakan faktor yang menjadi pengaruh. Adapula yang menjadi hambatan, antara lain masalah minimnya dana maupun fasilitas yang masih kurang memadai. Walaupun demikian program ini tetap dapat memberikan dampak atau output yang positif bagi masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem pada khususnya. Hal tersebut dapat diketahui pula berdasarkan hasil uraian mengenai adanya dampak/output setelah ada program COP yang akan diuraikan di bawah ini

³⁸ Wawancara dengan Bpk Damanhuri S.E (Ketua Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 13 Juli 2006.

³⁹ Wawancara dengan Bpk Supriyadi (anggota Pokja Klampis Ngasem), Tanggal 20 Juli 2006.



III.2.4. Dampak/Output Setelah Ada Program COP

Implementasi program COP di Kelurahan Klampis Ngasem telah berjalan selama lebih dari 2 tahun, yaitu mulai 9 April 2004. Hal tersebut telah membawa dampak perubahan terutama mengenai permasalahan kamtibmas. Untuk mengetahui apa saja dampak atau *output* program tersebut, berikut adalah beberapa informasi yang didapat :

“...Adanya program COP ini telah membawa dampak bagi Kelurahan Klampis Ngasem, antara lain ya perjudian sudah mulai berkurang (togel, adu dara), narkoba juga tidak ada lagi, dulu diwanung-wanung banyak yang jual miras, sekarang ini hampir tidak nampak lagi. Dengan kata lain program ini membantu tugas polisi untuk menjaga keamanan lingkungan, dengan begitu sebenarnya kecamatan dan kelurahan juga terbantu, begitu juga RT/RW. ...Selain itu juga faktor komunikasi antara polisi dan masyarakat yang dulu tidak ada komunikasi (buntu) sekarang ini dapat dilihat polisi sudah mau ke masyarakat, begitupun masyarakat yang sudah tidak segan-segan untuk berkomunikasi dengan polisi, walau itu semua butuh proses selama 2 tahun ini, yang tidak sebentar...”⁴⁰

Di wilayah Klampis Ngasem ini menurut staf Babinkamtibmas juga terjadi penurunan tindak kejahatan, dan berikut adalah hasil wawancaranya :

“...Untuk wilayah Klampis, dulu itu yang sering terjadi adalah judi adu dara, banyak yang menjual miras, dan termasuk pencurian kendaraan bermotor. Namun sekarang laporan mengenai masalah judi, miras tersebut di wilayah Klampis hampir tidak ada. Kalau pencurian sepeda motor sudah berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dampak lainnya juga masyarakat menjadi semakin kritis terhadap masalah-masalah kamtibmas, mengenai kinerja kepolisian, pelayanan dsb. ...Aparat kepolisian juga sudah tidak seperti dulu dalam menyelesaikan masalah kamtibmas, sekarang ini lebih bersikap preventif daripada represif...”⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Bpk Damarhuri S.E (Ketua Polja COP Klampis Ngasem), Tanggal 13 Juli 2006.

⁴¹ Wawancara dengan Bpk Aiptu Sutrisno (Babinkamtibmas Wilayah Klampis Ngasem, Polsek Sukolilo), Tanggal 21 Juli 2006.



Informasi yang hampir sama juga dikatakan sebagai berikut :

“...Sekarang ini tindak kejahatan menurun, dikampung-kampung judi-judi sudah tidak ada, minuman keras sudah tidak ada (karena banyak yang tertangkap akibat laporan warga), dan juga pencurian terutama sepeda motor berkurang tidak seperti dulu. Termasuk untuk wilayah Klampis Ngasem. ...Jadi menurut saya sekarang ini untuk tindak kejahatan warga semakin berani melapor kepada aparat, tidak seperti dulu kalau melapor takut dikira terlibat dan jadi berurusan dengan polisi. Dengan adanya COP ini menurut saya masyarakat jadi semakin terbuka dan semakin sadar hukum...”⁴²

Dampak yang lain juga dirasakan oleh anggota Polsek Sukolilo,

berdasarkan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“...Sekarang ini di wilayah Polsek Sukolilo warga sudah tidak segan-segan lagi untuk berbincang dengan polisi. Sekarang ini justru warga yang sering ‘menodong’ polisi untuk mampir di warung sambil ngopi dan ngobrol-ngobrol, kalau dulu-kan tidak seperti ini. Jadi saya sih senang aja bisa menyatu dengan masyarakat, ya kalau ada apa-apa kan warga sudah tidak segan-segan lagi untuk melapor...”⁴³

Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas para informan mengatakan hal yang hampir sama mengenai dampak atau *output* dari implementasi program COP di Kelurahan Klampis Ngasem, yaitu antara lain berkurangnya perjudian (togel, adu dara), miras dan pencurian sepeda motor. Selain itu dampak lainnya adalah masyarakat tidak takut lagi dengan polisi apabila melapor. Berdasarkan informasi di atas diketahui pula bahwa komunikasi antara polisi dan masyarakat menjadi semakin terbuka.

Apabila dilihat di atas sudah diuraikan berbagai masalah dan analisis mengenai penyajian data maupun informasi implementasi COP yang ada di

⁴² Wawancara dengan Bpk Aiptu Soepriyadi (Babinkamtibmas, Polsek Sukolilo), Tanggal 20 Juli 2006.

⁴³ Wawancara dengan Bpk Aiptu Soegiantoro (Babinkamtibmas, Polsek Sukolilo), Tanggal 20 Juli 2006.

Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem. Tapi dalam hal ini belum diketahui data atau informasi secara luas dalam satu wilayah Kecamatan Sukolilo dan Polsek Sukolilo. Untuk itu perlu juga menyajikan data yang ada di dalam satu wilayah Kecamatan Sukolilo dan Polsek Sukolilo sebagai informasi tambahan. Dan berikut adalah data tindak kejahatan secara keseluruhan di wilayah Kecamatan Sukolilo pada tahun 2004 dan tahun 2005, berdasarkan sumber yang diperoleh dari Polsek Sukolilo:

TABEL III.3
JUMLAH TINDAK KEJAHATAN WILAYAH POLSEK
SUKOLOLO TAHUN 2004-2005.

No.	Jenis Perkara	Tahun 2004		Tahun 2005		Keterangan
		L	S	L	S	
1	Pembunuhan	1	-	-	-	
2	Curat	60	37	27	15	
3	Curas	25	3	16	4	
4	Curat R-2	94	12	22	2	
5	Kebakaran	5	5	1	1	
6	Aniaya Berat	5	5	15	12	
7	Narkotika	3	3	2	2	
8	Judi	3	3	4	4	
9	Penggelapan	33	17	13	5	
10	Aniaya Ringan	31	28	-	-	
11	Sajam	4	3	1	1	
12	Mayat	12	12	1	1	
	Jumlah	276	128	102	54	46 % - 52 %

Sumber : Data Jumlah Tindak Kejahatan, Polsek Sukolilo 2005.

Data diatas merupakan jumlah tindak kejahatan pertahunnya dimana terjadi penurunan jumlah tindak kejahatan sebanyak 174, dari 276 menjadi 102 laporan tindak kejahatan. Dari hasil penyelesaian tindak kejahatannya pun terjadi peningkatan sebesar 6%, yaitu dari 46% pada tahun 2004 menjadi 52% pada tahun 2005. Untuk menguatkan kembali data atau informasi yang diperoleh tersebut, maka berikut disajikan data terakhir untuk bulan Mei 2006 dan bulan Juni 2006 di wilayah Kecamatan dan Polsek Sukolilo :

TABEL III
DATA KRIMINALITAS BULAN JUNI 2006,
DI WILAYAH POLSEK SUKOLILO

No.	Jenis Perkara	Bulan Mei 2006		Bulan Juni 2006	
		L	S	L	S
1	Pembunuhan	-	-	-	-
2	Penganiayaan Berat	1	1	2	2
3	Penganiayaan Ringan	-	-	7	5
4	Curat	5	2	8	4
5	Curas	-	-	1	1
6	Curanmor	5	-	8	-
7	Perkosaan/Perzinahan	1	1	-	-
8	Perjudian	16	16	9	9
9	Narkoba	3	3	1	1
	Jumlah	31	23	36	22

Sumber : Laporan Bulanan Kriminalitas Periode Juni 2006

Dua tabel diatas menggambarkan secara keseluruhan mengenai tindak kejahatan di wilayah Kecamatan Sukolilo. Dimana Kecamatan Sukolilo sendiri memiliki 7 Kelurahan antara lain Kelurahan Gebang Putih, Kelurahan Keputih, Kelurahan Klampis Ngasem, Kelurahan Medokan Semampir, Kelurahan Menur Plumpungan, Kelurahan Nginden Janukan dan Kelurahan Semolowaru.

Dari data tersebut memang perjudian dan pencurian kendaraan bermotor masih menjadi masalah kamtibmas tersendiri bagi wilayah Kecamatan Sukolilo. Kecamatan Sukolilo memang memiliki penduduk yang sangat padat dengan jumlah penduduk 96.510 jiwa, dimana juga terdapat banyak warga pendatang. Hal tersebut menjadikan wilayah ini rawan akan terjadi gangguan kamtibmas. Oleh sebab itu diperlukan adanya *social control* dalam masyarakat sebagai penyeimbang bagi kehidupan *civil society* dalam era globalisasi dan untuk perkembangan demokrasi.

Dalam hal ini keberadaan kelompok kerja (Pokja) COP menjadi sangat dibutuhkan di wilayah Kecamatan Sukolilo. Karena berdasarkan hasil wawancara



dan pengamatan Pokja COP merupakan wahana yang mencoba mempertemukan berbagai elemen yang ada dalam masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, RT/RW, aparat kepolisian, aparat kelurahan & kecamatan dalam hal membahas, mengambil kesimpulan, dan keputusan serta menentukan sikap menyangkut penyelenggaraan kamtibmas di sebuah tingkat kelurahan. Dimana bertujuan juga menggalang partisipasi masyarakat dan menghimpun potensi-potensi yang dimiliki masyarakat yang kemudian mengintegrasikan dalam tahapan penyelenggaraan kamtibmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan bisa berfungsi sebagai gerakan moral (sosial), sebagai kelompok penyeimbang, sebagai organisator, motivator, komunikator, dan mediator untuk berbagai masalah.

III.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI COP

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penyajian data selanjutnya akan menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program COP. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut akan diuraikan dengan berpedoman pada kerangka pemikiran teoritik yang ada, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), struktur birokrasi (karakteristik-karakteristik badan pelaksana), dan dukungan masyarakat. Untuk itu akan diuraikan masing-masing faktor tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



III.3.1 Komunikasi

Keberhasilan daripada implementasi program mensyaratkan agar para pelaksana (*implementor*) mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran program bisa dapat ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran (*target group*) yaitu dalam bentuk sosialisasi maupun koordinasi.

Program COP merupakan program yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, jadi dalam pelaksanaannya program ini melibatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk aparat dari kelurahan dan kepolisian. Oleh karena itu faktor komunikasi menjadi hal yang penting agar tujuan program bisa tercapai.

Dalam hal ini peneliti berhasil mendapatkan informasi dari anggota Pusham Unair yang menangani COP dan juga sebagai *field officer* Pokja COP di Keputih. Informasi yang didapat tersebut yaitu mengenai pengaruh faktor komunikasi maupun koordinasi pada pelaksanaan program COP. Dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Pusham Unair pada saat ini masih ikut membantu Pokja COP didalam sosialisasi dan komunikasi ke masyarakat mengenai COP, maupun koordinasi dengan dengan kepolisian. Pusham Unair juga sering mengisi berbagai pertemuan-pertemuan di tingkat RW maupun Kelurahan seperti di Keputih ini, bahkan pertemuan dengan warga hampir dilakukan setiap dua minggu sekali, itupun hingga jam 12 malam. ..Tapi memang masyarakat di Keputih sekarang ini sudah banyak yang mengerti tentang COP. Di sini kan juga terdapat Radio COP dengan gelombang 104 FM, itu juga kita gunakan sebagai sarana komunikasi kepada warga dan polisi...”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Mas Lutfi (*Field Officer* Pusham Unair untuk Pokja COP Keputih), Tanggal 17 Juni 2006.



Untuk melengkapi informasi peneliti juga mewawancarai Ketua Pokja Klampis Ngasem, yaitu mengenai faktor komunikasi didalam pelaksanaan program COP, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“...Kita sering mengadakan forum pertemuan untuk membicarakan permasalahan kamtibmas maupun masalah sosial yang ada di wilayah Klampis ini. Forum pertemuan tersebut dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat maupun dari kepolisian. Karena polisi juga ada yang ikut didalam anggota COP terutama yang dibagian Binmaspol. ...Forum itu sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan juga sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan polisi. Waktu dulu pertemuan-pertemuan seperti ini tidak ada, komunikasi buntu, tapi sekarang ini polisi sudah mau turun ke masyarakat...”⁴⁵

Hal yang senada juga dilontarkan oleh Lurah Keputih yang menanggapi pentingnya faktor komunikasi saat pelaksanaan program COP. Hasil wawancara dengan Lurah Keputih adalah sebagai berikut :

“...Saya tahu tentang COP begitupun aparat kelurahan yang ada di Keputih ini, hal itu karena COP sering melakukan komunikasi secara aktif dengan kelurahan. COP juga sering membuat pertemuan dengan warga di kantor kelurahan minimal 3 bulan sekali. Pertemuan itu selalu dihadiri dari tokoh masyarakat, karang taruna, aparat kelurahan, PKK, Pusham Unair, kepolisian (Polsek). Jadi selama ini komunikasi berjalan baik tidak ada masalah, semua pihak baik masyarakat dan polisi telah mendukung program COP ini. Karena menurut saya itu kuncinya adalah komunikasi, termasuk juga koordinasi. Sebenarnya kita juga sebagai aparat kelurahan juga melakukan koordinasi dengan RT/RW, apalagi dengan adanya COP kita jadi semakin terbantu terutama didalam mengupayakan untuk mengamankan wilayah dan lingkungan masing-masing baik secara kelompok maupun individu...”⁴⁶

Dari uraian informasi diatas, ada informasi lain yang berhasil didapati oleh peneliti terhadap hasil wawancara dengan Lurah Klampis Ngasem. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

⁴⁵ Wawancara dengan Bpk Daman Huri S.E (Ketua Pokja COP di Klampis Ngasem), Tanggal 12 Juli 2006.

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk Badjuri S.H (Lurah Keputih), Tanggal 20 Juli 2006.



“...COP menurut saya masih baru jadi masyarakat belum semua mengerti, apalagi menggunakan istilah asing. Harus ada perjuangan keras untuk sosialisasi karena masyarakat disini cenderung tidak peduli dengan hal-hal yang baru seperti itu, dan saya kira masyarakat juga masih belum seberapa mengetahui peran COP itu. Saya sendiri mungkin juga baru mengetahui program ini. ...Begini mas, istilah COP ini terlalu kebarat-baratan jadi masyarakat bingung, janganakan masyarakat aparat aja masih bingung, jadi mesti di bahasa indonesiakan dulu mungkin seperti itu...”⁴⁷

Dapat dilihat diatas bahwa antara pihak Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem berbeda pandangan dalam melihat faktor komunikasi yang dilakukan oleh COP. Dimana Kelurahan Keputih sudah merasa komunikasi yang dilakukan COP sudah baik, namun di Kelurahan klampis Ngasem masih merasakan kurangnya komunikasi dan sosialisasi program. Namun sebelum menganalisis hasil wawancara tersebut akan diuraikan terlebih dahulu informasi dari aparat kepolisian dan kecamatan.

Selain uraian informasi dari aparat kelurahan, juga didapat informasi dari aparat kepolisian Polsek Sukolilo mengenai faktor pengaruh komunikasi. Informasi tersebut adalah sebagai berikut :

“...Adanya komunikasi memang menjadi faktor pengaruh lancarnya pelaksanaan COP. Saya kira sampai saat ini komunikasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman Pokja COP sudah cukup baik, apalagi ada radio COP yang bisa menjadi jembatan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Saya sendiri sering mengisi program *talk show* mengenai sosialisasi COP, mengenai bagaimana kepolisian sekarang, maupun *talk show* mengenai permasalahan-permasalahan kamtibmas yang ada. ...Ya jadi komunikasi masih berjalan baik, karena saya sering melihat disaat pertemuan-pertemuan diskusi, dimana beberapa elemen masyarakat dan kepolisian ikut aktif menjalin komunikasi untuk membahas

⁴⁷ Wawancara dengan Bpk La Koli S.Sos (Lurah Klampis Ngasem), Kelurahan Klampis Ngasem, Tanggal 12 Juli 2006.

masalah kamtibmas yang ada, dan kemudian kita bersama mencari bagaimana solusi pemecahan terbaiknya...⁴⁸

ADLN - Perustakaan Universitas Airlangga
Untuk melengkapi informasi, berikut adalah hasil wawancara dengan

Camat Sukolilo mengenai faktor komunikasi atau koordinasi dengan pihak kecamatan :

“...Komunikasi memang faktor penting, terutama dalam pelaksanaan program COP ini. Yang saya ketahui komunikasi antara COP dengan Kecamatan cukup baik, memang kita tidak dilibatkan langsung setiap kegiatan COP. Tapi disaat ada pertemuan saya selalu diundang Pernah diundang 2 kali namun karena saya ada rapat dan ada pertemuan dengan Pak Walikota akhirnya saya selalu diwakilkan. ...COP ini setahu saya juga punya radio di Kelurahan Keputih, belum lama ini ada yang datang kesini pengurusnya dan menjelaskan ke saya mengenai radio itu, jadi ada komunikasi disitu menurut saya. COP juga sudah terbuka saja dengan kecamatan. ...Jadi menurut saya radio COP untuk kebaikan, dimana ada sosialisasi untuk menjaga keamanan, dan juga sebagai jembatan komunikasi antara polisi dan masyarakat, dimana akhirnya nanti tidak ada jarak semua duduk sama rata. ...Kecamatan sendiri kalau untuk koordinasi sama saja selama ini kita baik-baik saja, terutama dengan Muspika, instansi lain termasuk Polsek tetap berjalan baik...⁴⁹

Apabila dilihat dari berbagai uraian diatas dapat dianalisis bahwa berbagai pihak setuju dengan pentingnya faktor komunikasi, termasuk juga pentingnya sosialisasi dan koordinasi bagi pelaksanaan program COP. Beberapa pihak yang terlibat baik kelurahan, Polsek maupun kecamatan juga sudah merasakan komunikasi dan koordinasi selama ini berjalan baik. Namun ada juga hal yang dirasakan berbeda, yaitu oleh Lurah Klampis Ngasem yang merasakan COP masih kurang komunikasi dengan pihak Kelurahan Klampis Ngasem. Untuk mengetahui penyebabnya, maka berikut adalah hasil wawancara yang

⁴⁸ Wawancara dengan Bpk Soegiantoro Aiptu (Babinkamtibmas Polsek Sukolilo), Tanggal 19 Juli 2006.

⁴⁹ Wawancara dengan Bpk Drs. Subagiyo (Camat Sukolilo), Tanggal 19 Juli 2006.



menjelaskan mengapa Kelurahan Klampis Ngasem merasa kurangnya komunikasi antara COP dengan pihak kelurahan :

“...Kita selama ini selalu melibatkan kok pihak kelurahan Klampis, memang Lurah Klampis sudah baru lagi mungkin itu yang menyebabkan mengapa komunikasi masih kurang menurutnya. Tapi sejauh ini kita selalu bekerjasama dan melibatkan kelurahan termasuk juga Polsek...”⁵⁰

Hal senada juga dilontarkan oleh sekretaris Lurah Klampis Ngasem, yaitu sebagai berikut :

“...la kita pernah dilibatkan apabila ada pertemuan COP, kadang-kadang pertemuan itu dilakukan dengan memakai fasilitas di kelurahan. Tapi saya ataupun Lurah jarang mengikuti, karena staff kita sudah hadir di sana, khususnya dari Kesra...”⁵¹

Peneliti juga melakukan konfirmasi kembali kepada Lurah Klampis Ngasem. Dan didapati informasi sebagai berikut :

“...Ya yang jelas COP ini semacam organisasi yang ada dalam kemasyarakatan jadi tidak ada hal yang mengikat dengan kelurahan, selain itu juga karena tidak ada perintah dari atasan (Walikota) mengenai COP ini. ...Itu mungkin yang saya rasakan jadi kurangnya komunikasi antara Pokja COP dengan pihak kelurahan, ya tapi apabila ada kegiatan untuk kepentingan masyarakat saja kita fasilitasi, dan kita berusaha bantu dengan sarana seadanya. ...Tapi untuk mengetahui COP itu lebih dalam saya masih belum bisa. Saya sendiri baru menjabat sebagai lurah Klampis ini sejak 25 November 2005. Selama ini hanya itu saja yang saya tahu. Jadi memang sosialisasi ataupun komunikasi memang sangat penting, apalagi untuk program baru seperti COP...”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa kurangnya komunikasi yang dirasakan oleh Lurah Klampis Ngasem karena

⁵⁰ Wawancara dengan Mas Roni (Field Officer Pusham Unair untuk Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 20 Juli 2006.

⁵¹ Wawancara dengan Bpk Bambang Sutrisno S.E (Sekretaris Lurah Klampis Ngasem), tanggal 23 Juli 2006.

⁵² Wawancara dengan Bpk La Koli S.Sos (Lurah Klampis Ngasem), Tanggal 25 Juli 2006.



memang faktor pergantian jabatan baru sebagai Lurah Klampis Ngasem, yang dilakukan pada tanggal 25 November 2005. Selain itu juga karena tidak adanya hubungan yang bersifat mengikat antara program COP dengan Lurah, maka menyebabkan lurah berpandangan hanya cukup memberikan dukungan fasilitas, ataupun sarana saja apabila ada kegiatan COP yang akan bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan pihak kelurahan. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan para informan memang mengatakan faktor komunikasi sangat penting dan perlu dilakukan bagi pelaksanaan program COP.

III.3.2 Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi program COP. Sumber daya dalam hal ini meliputi staf (para pelaksana), fasilitas, dan dana. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sumber daya dalam pelaksanaan program COP, maka peneliti mencari beberapa sumber data melalui wawancara dan pengamatan.

Berdasarkan itu peneliti telah mewawancarai salah satu staf Pusham Unair yang ikut aktif dalam pelaksana COP, berikut adalah hasil wawancara tersebut mengenai sumber daya dana :

“...Untuk pelaksanaan COP kita mendapatkan bantuan dari *The Asia Foundation* sebagai lembaga donor, selain itu juga Pemkot karena waktu tahun 2005 kemarin juga memberikan alokasi anggaran lewat APBD untuk pelaksanaan program COP di beberapa Kelurahan, selebihnya kita melalui swadaya masyarakat sendiri. ...Untuk pelaksanaan COP di beberapa Kelurahan pengalokasian dana masih melalui Pusham Unair. Dana yang kita dapat dari TAF langsung kita distribusikan ke Pokja-Pokja dengan



melakukan kegiatan-kegiatan seperti diskusi, pelatihan, seminar dsb...⁵³

Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu pengurus Asosiasi Pokja COP, agar dapat mengetahui lebih jauh mengenai faktor sumber daya :

“...Pokja COP dalam melakukan kegiatannya diberikan bantuan oleh TAF lewat Pusham Unair, karena TAF bekerjasama dengan Pusham Unair dalam program ini. Kalau dananya, yang diperoleh COP sekitar 3 juta pertahun, dana tersebut digunakan untuk biaya operasional, untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, pelatihan, dsb. Selain itu Pemkot Surabaya juga telah memberikan dana bagi COP melalui APBD 2005...⁵⁴

Informasi lainnya mengenai masalah dana adalah sebagai berikut :

“...Untuk di Pokja Keputih dalam setiap melakukan kegiatan atau program kita memang mendapatkan bantuan juga dari warga sebagai donatur, terutama para pemilik modal atau pengusaha, dan pemilik tambak. Menurut saya itu sebagai wujud bentuk dukungan mereka terhadap program ini...⁵⁵

Selain sumber daya dana di atas peneliti mewawancarai pula sekretaris Lurah Keputih yang memiliki pandangan berbeda mengenai faktor sumber daya yang berpengaruh didalam pelaksanaan program COP, hasil wawancara yang didapat adalah sebagai berikut :

“...Untuk program COP ini sumber daya memang perlu ditingkatkan mas, seperti sumber daya manusianya. COP harus bisa melakukan komunikasi secara baik dengan masyarakat, harus menguasai informasi juga selain itu koordinasi juga bisa. Diharapkan para pelaksana program COP tahu mengenai birokrasi, terutama bagi leadernya. Selain itu para pelaksana harus memiliki wawasan yang luas, dan menguasai IT, karena sekarang ini kalau tidak seperti itu maka akan tertinggal mas...⁵⁶

⁵³ Wawancara dengan Mbak Sonya S.Sos (Staf Bagian Administrasi Pusham Unair), Pusham Unair, Ketintang, Tanggal 23 Juni 2006.

⁵⁴ Wawancara dengan Bpk Damanhuri S.E (Sekretaris Asosiasi COP Surabaya & Ketua Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 12 Juli 2006.

⁵⁵ Wawancara dengan Mas Khusnul Hidayat (Anggota Pokja COP Keputih), Tanggal 15 Juli 2006.

⁵⁶ Wawancara dengan Bpk Suparman Spd, (Sekretaris Lurah Keputih), Tanggal, 20 Juli 2006.



Berdasarkan informasi diatas bahwa dalam melaksanakan program COP selain dumber dana juga masih sangat diperlukan adanya sumber daya manusianya yang baik. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari ketua Pokja COP Keputih, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Untuk sumber daya manusia dalam Pokja COP ini memang masih terbatas, tapi menurut saya SDM yang berkualitas itu memang perlu ya apalagi dalam menghadapi masyarakat yang semakin heterogen dengan masuknya era globalisasi. ...Memang COP ini hanya program yang bersifat partisipasi sosial kemasyarakatan. Tentu kita tidak memberikan suatu ukuran bagi SDMnya, tapi kita yang memberikan pelatihan bagi mereka. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kita juga memberikan pelatihan pengorganisasian dengan SWOT, pelatihan kepemimpinan (bagaimana memimpin rapat), pelatihan fotografer, penyiar, dan pernah ada juga kursus jurnalistik. ...Ya pelatihan tersebut kalau tidak keluar kota (Malang) kita mengadakannya hanya di kelurahan dan balai RW atau di tempat Pusham unair...”⁵⁷

Adapula informasi lainnya dari ketua Pokja Klampis Ngasem, yaitu sebagai berikut :

“...Terus terang kita memang sangat membutuhkan fasilitas sebagai tempat kesekretariatan atau ruang kerja, ataupun sebagai tempat untuk mengadakan forum pertemuan. Selama ini kita mendompleng fasilitas dari kelurahan, atau balai RW dalam melakukan forum diskusi. ...Untuk kesekretariatannya saja masih memakai rumah saya. Saya harap kedepannya Pokja di Klampis ini bisa mandiri, agar program ini bisa berjalan efektif...”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor sumber daya memang sangat berpengaruh bagi pelaksanaan program COP di dua kelurahan yaitu Keputih dan Klampis Ngasem. Selama ini untuk sumber dana masih dibantu oleh TAF dan juga Pemerintah Kota Surabaya yang sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program COP. Namun dalam setiap

⁵⁷ Wawancara dengan Bpk Drs. Muhtarom (Ketua Pokja Keputih), Tanggal 21 Juli 2006.

⁵⁸ Wawancara dengan Bpk Damarhuri S.E (Ketua Pokja Klampis Ngasem), Tanggal 12 Juli 2006.



melakukan kegiatannya Pokja juga dibantu oleh warga yang menjadi donatur. Dan untuk sumber daya manusianya Pokja Keputih dan Klampis Ngasem juga sudah mengupayakan peningkatan kualitas, terbukti dengan mengikutsertakan semua anggota dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh COP. Namun untuk fasilitas dapat dilihat masih kurang, kedua Pokja tersebut belum memiliki kesekretariatan sendiri dan masih menggunakan fasilitas kelurahan dan balai RW.

III.3.3 Disposisi (Sikap Para Pelaksana)

Sikap para pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi program agar dapat berjalan efektif. Dalam hal ini peneliti juga meneliti bagaimana sikap ataupun pandangan-pandangan para pelaksana di lapangan dalam mengimplementasikan program COP, dan mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap faktor-faktor yang berpengaruh, yang menjadi hambatan para pelaksana dalam melaksanakan program COP.

Untuk itu peneliti mewawancarai beberapa sumber dari para pelaksana program COP antara lain adalah Ketua Pokja COP di Klampis Ngasem. Dan berikut adalah hasil wawancaranya :

“...Sebagai ketua Pokja COP di Klampis Ngasem, saya melihat teman-teman sesama anggota Pokja sangat mendukung sekali program COP ini. Tapi kita juga mengalami beberapa kendala yaitu kesibukan para pelaksana, karena COP ini kan bukan menjadi mata pencarian jadi di luar itu teman-teman Pokja juga bekerja. Yang saya ketahui sampai saat ini hal tersebut masih bisa diatasi yaitu apabila mengadakan pertemuan-pertemuan baik di tingkat RT, RW maupun kelurahan, itu selalu diadakan pada malam hari. Karena pada malam hari teman-teman Pokja di Klampis Ngasem ini



sebagia besar sudah tidak punya kesibukan lagi, dibanding siang hari...⁵⁹

Peneliti juga mewawancarai Ketua Pokja COP Keputih, yang hasil

wawancaranya sebagai berikut :

“...Sebagai pengurus Pokja kita selalu bekerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah, karena teman-teman di Pokja semua telah mendukung penuh program ini, jadi tidak ada kesulitan lagi dalam menyamakan visi. ...Setiap pengambilan keputusannya kita selalu melalui forum, jadi tidak ada kepentingan pribadi atau golongan dan juga tekanan dari manapun, semua bertujuan agar setiap permasalahan yang ada bisa diselesaikan sampai ke akar permasalahannya...⁶⁰

Informasi lainnya dari Pusham Unair adalah sebagai berikut :

“... Saya sebagai *field officer* dari Pusham untuk program COP di Keputih atau mewakili teman-teman saya yang lain, disini kita selalu membantu setiap kegiatan yang diadakan oleh Pokja COP di tiap-tiap kelurahan. Seperti di Keputih ini, saya selalu ikut membantu apabila ada pertemuan atau kegiatan. Selain itu apabila ada unjuk rasa seperti kasus perbaikan jalan, saya selalu mendampingi Pokja dan juga berusaha menjadi mediator aspirasi warga...⁶¹

Peneliti juga mewawancarai Wakapolsek Sukolilo, untuk memberikan keterangan bagaimana sikap kepolisian secara pribadi maupun organisasi menanggapi pelaksanaan program COP. Hasil wawancara yang berhasil didapat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

“...Kita sangat mendukung program tersebut, disini kita sudah menugasi khusus Babinkamtibmas untuk membantu dan merespon setiap ada kegiatan COP. Pak Kapolsek sendiri juga sering menghadiri undangan pertemuan-pertemuan atau diskusi mengenai permasalahan kamtibmas bersama dengan warga. Menurut saya COP ini bagus kita bisa bekerjasama dan menjadi mitra masyarakat dalam menangani permasalahan kamtibmas yang ada. ...Terbukti

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk Damanhuri S.E (Sekretaris Asosiasi COP Surabaya & Ketua Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 12 juli 2006.

⁶⁰ Wawancara dengan Bpk Drs. Muhtarom (Ketua Pokja COP Keputih), Tanggal 21 Juli 2006.

⁶¹ Wawancara dengan Mas Lutfi (Field Officer Program COP di Kelurahan Keputih), Tanggal 17 Juni 2006, jam 10.00 WIB



berdasarkan informasi dari warga hal tersebut membuahkan hasil berbagai penemuan kasus, seperti pencurian sepeda motor, bahkan pernah pembunuhan. Selain itu kemarin ini juga baru tertangkapnya pabrik extassy di daerah Nginden, ya bulan Juni kemarin ini, nama yang punya pabrik itu adalah Pak Handoko, dan pihak kepolisian sudah berhasil menangkapnya bersama komplotan lain. ...Jadi menurut saya partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga keamanan seperti COP ini sangat bagus sekali, polisi dibantu dengan adanya komunikasi dan informasi oleh warga. Karena sebenarnya dari pusat (Kapolri) juga sudah menginstruksikan jajarannya untuk menjadikan kepolisian sebagai mitra masyarakat, dengan adanya Skep Kapolri No.737/X/2005...⁶²

Selain sumber yang didapat dari Pokja COP dan Polsek diatas, peneliti juga mencari sumber lain yang ada di Kecamatan. Dan peneliti berhasil mewawancarai Camat Sukolilo, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Menurut saya COP ini merupakan suatu bentuk kerjasama masyarakat dengan kepolisian. Jadi saya sangat setuju ada COP, karena tujuannya supaya masyarakat peduli dengan masalah keamanan. Karena keamanan itu bukan hanya tanggungjawab kepolisian saja, masyarakat seharusnya juga bertanggungjawab, selain dikarenakan jumlah perbandingan polisi dengan masyarakat sangat terbatas, dilain itu juga urbanisasi semakin terus meningkat. ...Tapi yang saya sesalkan ternyata baru-baru ini ada pabrik extassy di daerah Nginden, tempatnya di rumah kontrakkan dan pemilik pabrik itu sudah tertangkap langsung oleh Polwiltabes. Yang saya tahu Kapolda juga melihat TKP, hanya beliau menggunakan mobil plat hitam jadi masyarakat tidak tahu, saya pun baru tahu setelah ditelepon oleh staf saya bahwa ada Kapolda ke lokasi... Untuk kegiatan COP saya sendiri pernah diundang 2 kali pertemuan dengan COP, tapi sayangnya pertemuan itu selalu berbenturan dengan hal yang lebih penting jadi saya wakilkan saja Saya meminta staf untuk menghadiri pertemuan itu. Waktu itu bersamaan ada Walikota berkunjung ke Sukolilo, jadi saya mendampingi beliau dan undangan berikutnya juga dengan waktu yang bersamaan saya harus menghadiri rapat di Pemkot, yang tidak boleh diwakilkan. Jadi saya secara langsung belum ketemu dengan COP, secara pribadi saya ingin sekali bertemu dengan mereka dan masyarakat. Menurut saya kalau ada kegiatan yang bermanfaat dari masyarakat atau COP saya siap mendukung, tidak pernah

⁶² Wawancara dengan Bpk Iptu Kusmin (Wakapolsek Sukolilo), Tanggal 19 Juli 2006.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
menghambat apabila ada proposal untuk kemasyarakatan saya
tanda tangan aja semua, asalkan bisa dipertanggungjawabkan...⁶³

Sikap para pelaksana memang salah satu faktor yang berpengaruh bagi pelaksanaan program COP. Hal yang sependapat juga berhasil diwawancarai oleh peneliti, hasilnya adalah sebagai berikut :

“...Sikap para pelaksana juga bisa berpengaruh dalam melaksanakan program COP. Saya artikan disini bahwa perlu ada kesamaan visi bagi para pelaksana agar keluarannya bisa satu bahasa. Menurut saya itu yang menjadi hambatan bagi birokrasi saat ini. Jadi harus ada kesamaan bahasa, dan keterbukaan agar tidak terjadi *miss understand*. Dan dalam program COP ini aparat bersama dengan warga dituntut untuk bisa kesana. Ya...saya sebagai aparat kelurahan ya ikut mendukung untuk kesuksesan program tersebut...⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi di atas dapat dianalisis bahwa pandangan para pelaksana program COP cenderung sama, yaitu memiliki pandangan bahwa program COP bertujuan menjaga stabilitas kamtibmas sesuai dengan karakteristik wilayah. Dimana diketahui aparat dari Kelurahan (Keputih dan Klampis Ngasem), Polsek Sukolilo, dan Pusham Unair, telah memiliki visi yang sama mengenai program COP. Jadi tidak ada hambatan pada faktor para pelaksana di lapangan. Adanya berbagai kesibukan para pelaksana baik tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya telah bisa diatasi dengan mengadakan forum pertemuan untuk diskusi di malam hari. Dalam hal ini berarti adanya dukungan oleh sikap para pelaksana di kedua Pokja.

⁶³ Wawancara dengan Bpk Drs. Subagiyo (Camat Sukolilo), Tanggal 19 Juli 2006

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk Suparman Spd (Sekretaris Lurah Keputih), Tanggal 20 Juli 2006.

III.3.4 Struktur Birokrasi (Karakteristik Badan-Badan Pelaksana)

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program selalu dipengaruhi dengan adanya badan-badan administratif terutama di dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana tersebut maka hal ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi dalam hal ini diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dengan menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan/program. Komponen ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari para personil. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

Program COP merupakan suatu program yang memiliki hubungan atau *linkage* dengan beberapa badan/instansi yang terkait untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa badan yang terlibat dalam pelaksanaan program COP di Kota Surabaya antara lain Pusham Unair, *The Asia Foundation*, Kepolisian (Polwiltabes, Polres, Polsek, dan pemerintah (Pemkot, Kecamatan, Kelurahan).

Untuk Pokja COP sendiri badan-badan yang secara langsung terlibat adalah unsur pemerintahan di tingkat Kelurahan, dan unsur dari kepolisian di tingkat Polsek. Jadi dalam hal ini implementasi COP di Pokja Keputih dan Pokja Klampis Ngasem hanya berhubungan dengan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih&Kelurahan Klampis Ngasem, serta Polsek Sukolilo.

Dalam hal ini peneliti mencoba mencari beberapa sumber untuk mengetahui bagaimana hubungan antar badan-badan tersebut didalam pelaksanaan program COP di Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem. Selain itu juga peneliti mencari sumber mengenai bagaimana mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur dari masing-masing badan tersebut.

Untuk itu peneliti mewawancarai Lurah Klampis Ngasem sebagai yang mewakili dari pihak Kelurahan Klampis Ngasem di dalam pelaksanaan program COP, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...COP di Klampis Ngasem ini yang saya tahu ada Pokja yang diketuai oleh Pak Daman Huri, yang boleh dibilang sebagai tokoh masyarakat...Dalam melaksanakan kegiatannya mereka selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Seringkali juga kita memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang diadakan COP, kita menyediakan tempat di Kelurahan untuk berkumpulnya warga dan polisi dalam membicarakan mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Pihak kelurahan juga selalu dilibatkan dalam seminar-seminar atau workshop yang diadakan oleh COP biasanya yang kita hadirkan adalah dari Kasi Kesra Kelurahan. Untuk masalah kamtibmas yang ada di Klampis ini kita selaku aparat juga melakukan koordinasi dengan Polsek, itu harus menurut saya karena kita memiliki kewenangan yang berbeda jadi perlu kita lakukan...”⁶⁵

Peneliti juga mewawancarai salah satu aparat kepolisian untuk mendapatkan sumber yang berbeda, yaitu :

“...COP memang ada di wilayah kita, sebagai aparat keamanan kita selalu dilibatkan apabila ada pertemuan-pertemuan (diskusi, workshop, seminar) dengan warga. Di Polsek ini ada beberapa petugas yang memang menangani COP antara lain saya sendiri terus ada juga Pak Soegianta. Kita juga punya Babinkamtibmas yang selalu berkoordinasi dengan Pokja COP...”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Bpk La Koli S.Sos (Lurah Klampis Ngasem), Tanggal 4 Juli 2006.

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk Aiptu Soegiantoro (Babinkamtibmas Polsek Sukolilo), Tanggal 17 Juli 2006.

Dari informasi diatas peneliti menambahkan informasi lain dengan mewawancarai Sekretaris Camat perihal struktur birokrasi. Dan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

“...Saya belum tahu banyak mengenai COP, saya rasa sosialisasinya masih terbatas..artinya belum secara keseluruhan masyarakat tahu mengenai COP dan bagaimana kerjanya. Menurut saya adanya informasi mengenai COP hanya sampai pada elemen-elemen tertentu atau yang boleh dibilang yang konsen dengan masalah itu saja. Saya selama tujuh bulan kerja di sini belum pernah ada pertemuan, dan belum pernah ada sosialisasi mengenai COP. COP pernah sekali kesini tapi hanya koordinasi untuk mengadakan kegiatan yaitu studi banding ke Jogja (meminta bantuan dana)...”⁶⁷

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai beberapa staf di Kecamatan Sukolilo, dan berikut adalah hasil wawancaranya :

“...COP? apa itu COP saya tidak tahu...kalau NJOP saya tahu...”

“...Saya tidak tahu COP...”

“...COP saya juga tidak tahu...”⁶⁸

Pada waktu yang berbeda peneliti kembali mewawancarai Wakapolsek Sukolilo, untuk mengetahui bagaimana hubungan struktur organisasi antara Polsek Sukolilo dengan Pokja Keputih dan Pokja Klampis Ngasem, yaitu :

“...COP kemarin yang saya tahu baru diadakan kegiatan workshop di Tretes bersama dengan Pokja-Pokja COP, Asosiasi Pokja COP, dan Pusham Unair. Ada beberapa anggota kami yang berangkat kesana antara lain Pak Jarno, Pak Sugianta, Pak Supriyadi, dan Pak Soegiantoro. Pak Kapolsek tidak ikut dan sudah diwakilkan oleh anggota kami tadi dari Babibkamtibmas...”⁶⁹

Dan seperti apa tanggapan dari Ketua Pokja COP Keputih mengenai struktur birokrasi, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

⁶⁷ Wawancara dengan Bpk Drs. Agus Wiyono (Sekretaris Camat Sukolilo), Tanggal 18 Juli 2006.

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk Kusuari (Kasi Kesra Kecamatan Sukolilo), Pak Herry, Bu Jirah, Pak daliman (Staf Sekretariat Kecamatan Sukolilo), Tanggal 18 Juli 2006.

⁶⁹ Wawancara dengan Bpk Iptu Kusmin (Wakapolsek Sukolilo), Tanggal 19 Juli 2006.



“...Struktur birokrasi khususnya yang ada di Kelurahan Keputih ini yang masih saya lihat adalah dalam proses perubahan adanya standar pelayanan minimum (SPM) dan juga belum diterapkan standarisasi biaya. Hal tersebut masih terus kita perjuangkan, agar masyarakat tahu bagaimana standar pelayanan dan standarisasi yang harus diberikan oleh aparat pemerintahan ataupun aparat kepolisian kepada masyarakat. ...Seperti contohnya aja ya mas, kalau kita mengurus SIM, KTP, dsb kita pasti akan menjumpai perbedaan proses pelayanan dan juga harganya yang harus kita bayar (ada yang melalui calo dsb). Itu karena tidak menerapkan standarisasinya...”⁷⁰

Informasi lainnya yang diperoleh adalah :

“...Kita mas selaku aparat kelurahan pada dasarnya turut mendukung program COP, karena ini berasal dari tekanan-tekanan masyarakat di luar unit-unit birokrasi yang menginginkan terciptanya stabilitas keamanan. Menurut saya selama itu baik buat masyarakat kenapa tidak. ...Secara tertulis dan resemi dari atasan memang belum ada untuk mendukung program COP, namun secara lisan kita sering mendengar mengenai program ini, termasuk dari berbagai kelurahan. Ya saya rasa ini juga sudah mendapat respon positif dari pak Walikota...”⁷¹

Berdasarkan informasi di atas dapat dianalisis bahwa aparat kelurahan maupun aparat kepolisian Polsek Sukolilo memang mendukung program COP. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, faktornya adalah tidak diterapkannya standar pelayanan minimum, dan standarisasi biaya kepada masyarakat. Sampai sekarang Pokja COP Keputih masih ingin memperjuangkannya terutama di Kelurahan Keputih.

III.3.5 Dukungan Masyarakat (Kelompok Sasaran)

Dukungan masyarakat merupakan salah satu pengaruh besar dalam pelaksanaan COP, terutama di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis

⁷⁰ Wawancara dengan Bpk Soegiyono B.A (Sekretaris Pokja COP Keputih & Ketua Asosiasi Pokja COP Surabaya), Tanggal 22 Juli 2006.

⁷¹ Wawancara dengan Bpk Suparman Spd (Sekretaris Kelurahan Keputih), Tanggal 25 Juli 2006.



Ngasem. COP dalam hal ini telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendapatkan suatu bentuk dukungan dari masyarakat, seperti adanya sosialisasi lewat radio dan majalah, dan mengadakan forum diskusi bersama warga dan polisi. Berdasarkan faktor pengaruh dari dukungan masyarakat, peneliti mencoba mencari sumber di lapangan melalui wawancara dengan beberapa sumber antara lain ketua Pokja COP Klampis Ngasem, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Masyarakat sangat mendukung COP ini, dari RT, RW, sampai Kelurahan juga mendukung sekali termasuk kepolisian (Polsek Sukolilo). Kita seringkali mengadakan pertemuan diskusi mengenai permasalahan kamtibmas di balai RW atau di Kelurahan, respon masyarakatnya sangat bagus dan antusias. Memang dukungan masyarakat terhadap program ini sangat berpengaruh sekali. ...Awalnya memang masyarakat masih belum merespon program ini, tapi setelah kita sosialisasikan dan mengadakan forum mengenai program COP kepada warga khususnya tokoh-tokoh masyarakat, respon yang ada adalah masyarakat jadi tahu dan semakin kritis. Setelah masyarakat mengerti baru ada dukungan yang begitu besar terhadap program ini...”⁷²

Peneliti juga mewawancarai seorang anggota Pokja COP di Keputih, yaitu sebagai berikut :

“...Terus terang ya, masyarakat di sini sangat mendukung sekali, terutama dengan adanya radio komunitas COP ini masyarakat semakin banyak yang tahu tentang COP. Adanya dukungan masyarakat itu bisa dilihat berkurangnya permasalahan kamtibmas, yang dulu banyak judi togel, adu dara, dan minuman keras, sekarang ini hampir tidak ada. Itu merupakan suatu bentuk dukungan nyata dari seluruh elemen masyarakat terhadap program COP. ya baik itu RT/RW, kelurahan, kepolisian khususnya Polsek Sukolilo, para pemuda karang taruna, PKK. ...Jadi warga sini ya mas, saya kira telah mempunyai tujuan yang sama untuk menciptakan keamanan. Memang sangat berpengaruh sekali

⁷² Wawancara dengan Bpk Daman Huri S.E (Ketua Pokja COP Klampis Ngasem), Tanggal 14 Juli 2006.

adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini...⁷³

Untuk melengkapi informasi mengenai dukungan masyarakat, peneliti juga mewawancarai dari pihak kepolisian, yaitu sebagai berikut :

“...Respon masyarakat setelah tahu mengenai program COP senang, karena COP sering melakukan pertemuan bersama masyarakat dan kepolisian terutama dalam membahas masalah kamtibmas. Yang saya tahu masyarakat sangat antusias sekali, bahkan COP ini jadi kesempatan untuk masyarakat mengkritik kepolisian tapi saya selaku petugas respon saya menanggapi hal tersebut dengan baik...”⁷⁴

Peneliti juga mewawancarai dari pihak Kelurahan yaitu Lurah Keputih, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“...Masyarakat sebagian besar di Keputih sangat mendukung sekali, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dsb sangat mendukung program COP. Di kantor Kelurahan ini sering diadakan pertemuan COP pada malam hari, yang saya lihat respon masyarakat cukup bagus. Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat saya kira program COP tidak akan jalan...”⁷⁵

Berdasarkan sumber diatas mengatakan bahwa sebagian masyarakat mendukung pelaksanaan program COP, tapi hal tersebut berbeda dengan hasil wawancara peneliti di Kelurahan Klampis Ngasem, yaitu sebagai berikut :

“...Saya tahu tentang COP tapi luarnya saja, begitupun masyarakat di sini saya kira belum semua mengerti betul tentang COP, ya kalau boleh dibilang sekitar 40% saja yang mengerti tentang COP selebihnya tidak mengerti. ...Namun saya rasa dukungan dari sebagian masyarakat sudah ada, terutama tokoh-tokoh masyarakat disini, Ketua RW/RT, karang taruna, dan PKK...”⁷⁶

⁷³ Wawancara dengan Mas Khusnul Hidayat (Koordinator divisi radio Asosiasi Pokja COP Surabaya & anggota pokja COP Keputih), Tanggal 16 Juli 2006.

⁷⁴ Wawancara dengan Bpk Sujarno (Babinkamtibmas Polsek Sukolilo), Tanggal 17 Juli 2006.

⁷⁵ Wawancara dengan Bpk Badjuri S.H (Lurah Keputih), Tanggal 3 Juli 2006.

⁷⁶ Wawancara dengan Bpk Bambang Sutrisno S.E (Sekretaris Lurah Klampis Ngasem), Tanggal 19 Juni 2006.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa dukungan dari masyarakat kepada program COP di dua kelurahan yaitu Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem sudah cukup besar. Terbukti dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti, bahwa tokoh masyarakat, RT/RW, karang taruna, dan PKK telah mendukung program tersebut dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti forum diskusi.





BAB IV INTERPRETASI DATA

Dalam bab ini akan diuraikan analisa data tentang implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), struktur birokrasi (karakteristik badan-badan pelaksana), dan dukungan masyarakat. Untuk menginterpretasi data maka peneliti akan mengacu pada teori-teori yang ada didalam kerangka pemikiran teoritik di bab sebelumnya. Acuan pada teori tersebut juga tidak mengesampingkan adanya temuan menarik yang lain di luar kerangka teori. Karena penelitian kualitatif bisa berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

IV.1 IMPLEMENTASI PROGRAM COP

IV.1.1 Struktur Pengorganisasian Dan Proses Pembentukan Pokja

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diinterpretasikan bahwa Pokja COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem sudah memiliki kepengurusan, yaitu mulai dari ketua Pokja, sekretaris, bendahara, anggota, dan juga terdapat divisi khusus anak. Selain itu khusus Pokja Keputih juga terdapat kepengurusan dalam divisi radio (Radio Komunitas COP 104 FM), yang ikut membantu dalam operasionalisasi penyiaran.

Dari hasil penelitian telah menunjukkan pula bahwa dalam struktur pengorganisasian Pokja, di dua kelurahan telah sama-sama melibatkan seluruh

elemen masyarakat, antara lain tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda (karang taruna), PKK, aparat kelurahan, dan kepolisian. Seperti di Kelurahan Keputih ada Kasi Trantib dari kelurahan yang menjadi ketua pokja Keputih, ada tokoh agama dari NU sebagai wakilnya, dan ada tokoh pemudanya sebagai ketua divisi radio. Sedangkan di Kelurahan Klampis Ngasem, tokoh masyarakat setempat juga terlibat menjadi ketua Pokja, dan ada anggota Babinkamtibmas dari Polsek Sukolilo yang ikut sebagai anggota Pokja.

Untuk proses pembentukan Pokja COP di Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem, adalah dengan melalui pertemuan dalam bentuk forum diskusi, bersama seluruh elemen masyarakat, kelurahan, RT/RW dan polisi. Forum tersebut disebut dengan FGD (*focus group discussion*). Melalui FGD tersebutlah dilakukan pemetaan permasalahan, dan pencarian solusi ke akar permasalahan mengenai kamtibmas, yang permasalahannya hampir sama di dua kelurahan yaitu curanmor, perjudian, miras, dan banyaknya warga pendatang yang tidak terdata. Selain itu juga membahas mengenai isu-isu kepolisian dan masyarakat yang berkembang di antara lain dalam hal pelayanan kepengurusan surat-surat di kantor polisi, tindakan represif aparat, penyalahgunaan wewenang, dan hubungan antara polisi dengan masyarakat.

Setelah melakukan berbagai pertemuan/FGD melalui tiga kali forum diskusi, masyarakat di dua kelurahan tersebut bersedia menyepakati dibentuknya Pokja COP, dimana melalui forum juga dipilih langsung seorang ketua Pokja. Berdasarkan temuan data pihak-pihak yang menjadi para pelaksana program COP di wilayah pokja sebagian besar adalah tokoh masyarakat setempat.



IV.1.2 Karakteristik Pelaksanaan Program & Penanganan Masalah

COP merupakan program yang bertujuan menciptakan dan memelihara situasi kamtibmas yang mantap dan terkendali juga membudayakan masyarakat yang tertib dan taat hukum. Dalam pelaksanaannya program COP lebih menyesuaikan dengan karakteristik permasalahan masyarakat masing-masing wilayah, begitu juga dengan pelaksanaan COP di wilayah Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Di Kelurahan Keputih berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, merupakan suatu wilayah yang rawan tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian tambak, minuman keras (miras), dan perjudian (togel). Selain masalah kamtibmas ada juga masalah sosial seperti banyaknya penduduk pendatang yang tidak terdata, terutama di areal kos-kosan. Di Pokja Keputih juga ikut membantu warga dalam menyelesaikan masalah lainnya seperti pembetulan jalan yang rusak, pengusuran PKL, dan pemindahan TPA dari Keputih ke Tandes.

Dari hasil wawancara penanganan yang dilakukan oleh Pokja COP di Keputih adalah dengan mengadakan forum pertemuan atau forum diskusi antara elemen masyarakat dan polisi yang diselenggarakan minimal satu bulan sekali. Adanya forum tersebut adalah untuk membahas mengenai masalah dan mencari solusi akar permasalahannya, seperti masalah-masalah yang telah disebutkan di atas.

Pelaksanaan program COP di Keputih berdasarkan hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa tidak hanya melakukan penanganan terhadap masalah

kamtibmas saja, melainkan juga mengenai masalah sosial dan HAM. Penanganan masalah sosial tersebut antara lain melakukan pendataan bagi warga pendatang, pembuatan Kipem, pemberian beasiswa bagi anak sekolah dasar yang kurang mampu, dan penyuluhan kepada warga tentang perlindungan hak anak.

Selain melakukan penanganan langsung terhadap masalah di atas Pokja Keputih juga melakukan kegiatan sosialisasi secara terus menerus mengenai program COP melalui stasiun radio komunitas COP, yang berada di dekat kantor Kelurahan Keputih. Radio tersebut melakukan aktivitas "on air" membahas mengenai permasalahan yang ada dalam masyarakat, seperti permasalahan kamtibmas, masalah sosial dan juga berita-berita lainnya yang "up to date". Kegiatan di radio COP tersebut antara lain mengadakan acara *talk show* dengan narasumber yang kompeten dibidangnya antara lain aparat kepolisian yaitu Kapolsek, Babinkamtibmas, aktivis gender, aktivis HAM, tokoh masyarakat, sosiolog, maupun aparat kelurahan terutama Lurah, & Seksi Trantib. Selain itu radio COP juga melakukan interaktif dengan warga dan polisi, sebagai sarana komunikasi yang terbuka antara masyarakat dengan polisi.

Sedangkan untuk Pokja COP di Kelurahan Klampis Ngasem, juga memiliki karakteristik permasalahan yang hampir sama dengan Kelurahan Keputih yaitu tingginya angka curanmor, minuman keras, banyaknya penduduk pendatang yang tidak terdata, banyaknya PKL liar, parkir liar dan perjudian, terutama judi adu dara. Penanganan yang telah dilakukan Pokja Klampis Ngasem yaitu penurunan sangkar burung dara (bekupon) dengan tidak melebihi tinggi atap

rumah, yaitu dengan melalui himbauan RT/RW warga yang memiliki burung dara bersedia menurunkan sangkar rumahnya tanpa ada paksaan.

Untuk masalah curanmor Pokja Klampis Ngsem telah membuat himbauan langsung kepada warga agar membuat kunci ganda, parkir kendaraan ditempat yang aman atau bisa terlihat. Selain itu Pokja Klampis juga melakukan himbauan melalui pembuatan bentuk poster, stiker yang ditempel terutama ditempat-tempat yang rawan curanmor, seperti daerah kampus, dan areal kos-kosan.

Adapula penanganan masalah lainnya yang dilakukan oleh Pokja Klampis, antara lain masalah pemadaman lampu jalan di jalan Klampis Semalang III karena warga tidak membayar selama tiga bulan, yang diproses melalui Dinas Pertamanan bersama RT/RW setempat. Selain itu juga penanganan masalah kebijakan “Satu Jiwa Satu Pohon” yang sebagian diresahkan oleh warga karena adanya pungutan liar yang tidak tahu kemana uangnya. Hal tersebut juga berhasil dibawa ke DPRD Kota Surabaya, dan langsung ditanggapi oleh Walikota dengan memanggil seluruh Lurah di Surabaya.

Berdasarkan interpretasi di atas karakteristik pelaksanaan program dan penanganan masalah di dua Kelurahan tersebut memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Persamaan yang melekat pada karakteristik masalahnya adalah mengenai jenis tindak kejahatan seperti curanmor, perjudian, dan miras, selain itu untuk masalah sosial adalah banyaknya penduduk pendatang tidak terdata. Dimana hal tersebut sudah menjadi masalah umum dan telah menjadi target sasaran program COP.

Sedangkan untuk masalah lainnya lebih berdasarkan pada adanya tuntutan warga di masing-masing kelurahan, seperti di Kelurahan Keputih tuntutan warga antara lain pembetulan jalan yang rusak parah, pemindahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan penggusuran PKL liar yang mendekati rumah warga. Sedangkan di Kelurahan Klampis Ngasem tuntutan warga antara lain kasus pemadaman lampu jalan, kasus "Sajisapo" yang dinilai sebagian masyarakat cenderung menimbulkan pungutan liar (pungli).

Adanya berbagai karakteristik masalah di masing-masing kelurahan tersebut, Pokja di kedua kelurahan tetap melakukannya yaitu dengan melalui pertemuan atau forum diskusi dahulu dengan berbagai elemen masyarakat dan kepolisian. Dimana forum diskusi itu membahas mengenai inti permasalahan yang ada beserta membahas bagaimana solusi dalam menyelesaikan ke akar permasalahannya.

IV.1.3 Faktor Pengaruh Dan Hambatan

Berdasarkan hasil penelitian dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem dapat diinterpretasikan bahwa terdapat beberapa kesamaan mengenai faktor pengaruh dan hambatan. Di Kelurahan Keputih dari hasil pengamatan dan wawancara dapat diinterpretasikan dukungan masyarakat dan komunikasi, menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi bagi pelaksanaan program COP.

Dapat diketahui masyarakat di Kelurahan Keputih sebagian besar telah merespon positif program COP, hal tersebut terbukti dari proses komunikasi dan

sosialisasi yang telah dilakukan Pokja Keputih selama ini, dan terbukti juga dari hasil wawancara para tokoh masyarakat yang terlibat sebagai pengurus Pokja.

Adanya dukungan masyarakat tersebut telah dipengaruhi oleh karena proses komunikasi yang terbuka antara warga, maupun antara polisi dengan warga di dalam forum-forum diskusi. Bukan melalui forum itu saja, selain itu adanya radio COP 104 FM di Keputih juga memiliki pengaruh besar terhadap sosialisasi maupun dalam pelaksanaan program, terutama bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Keputih. Radio tersebut dinilai menjadi lebih efektif untuk melakukan sosialisasi program kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara yang diperoleh, di Kelurahan Keputih sebelumnya tindak kejahatan miras, pencurian sepeda motor banyak sekali terjadi, tapi dengan adanya radio COP di tengah-tengah masyarakat tindak kejahatan tersebut dirasakan semakin berkurang. Dengan radio ini proses sosialisasi menjadi lebih cepat dan manfaat lainnya warga juga bisa mendengar langsung *talk show* oleh para pakar dan juga narasumber yang kompeten. Dari radio tersebut masyarakat juga bisa ikut memberikan tanggapannya didalam program interaktif yang membahas mengenai berbagai masalah dan isu-isu lainnya yang berkembang dalam masyarakat.

Namun yang menjadi hambatan di Pokja Keputih adalah mengenai masalah dana yang masih minim untuk operasional. Seperti didalam mengadakan kegiatan pertemuan, dimana biasanya warga yang memberikan swadainya, antara lain dari donatur dan stakeholders. Selain minimnya dana, berdasarkan hasil wawancara hambatan lainnya adalah struktur birokrasi yang belum memiliki

standar pelayanan minimum (SPM). Tidak adanya standarisasi baku dalam pelayanan maupun biaya menyebabkan tidak adanya kepastian sikap para pelaksana di tingkat Pokja atau kelurahan, dimana efeknya akan menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pelayanan, dan juga berefek memboroskan sumber-sumber. Mengenai masalah SPM dalam struktur birokrasi/organisasi, dari hasil wawancara hal tersebutlah sampai sekarang masih diperjuangkan oleh Pokja Keputih.

Sedangkan untuk Kelurahan Klampis Ngasem dapat diinterpretasikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan program COP adalah dukungan masyarakat (partisipasi masyarakat), sumber daya, struktur birokrasi, disposisi dan juga faktor komunikasi. Faktor pengaruh tersebut hampir menyerupai Pokja COP yang ada di Kelurahan Keputih. Dari hasil wawancara implementasi COP Klampis Ngasem telah mendapatkan dukungan masyarakat, dimana dukungan tersebut menurut hasil wawancara karena adanya berbagai pertemuan yang di anggap sebagai proses komunikasi, koordinasi dan sosialisasi.

Dari hasil wawancara, sumber daya juga memiliki pengaruh untuk pelaksanaan COP yaitu terbukti dengan mengikutsertakan para pelaksana kedalam pelatihan-pelatihan atau workshop untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan dan mencari solusi yang difokuskan pada akar permasalahan, dan juga untuk mengetahui bagaimana menjadi sebagai fasilitator yang baik. Selain sumber daya, struktur birokrasi juga memberikan pengaruh besar dalam membentuk kesepakatan-kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah. Faktor lainnya adalah bagaimana dukungan sikap para pelaksana yang diberikan,

dalam hal ini adalah dukungan dari aparat kelurahan dan aparat kepolisian baik secara pribadi maupun organisasi. Dimana itu semua memiliki ketergantungan terhadap faktor komunikasi yang memberikan suatu bentuk proses sosialisasi, koordinasi untuk memberikan kemudahan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Dan yang menjadi hambatan pelaksanaan program di Klampis Ngasem adalah sumber dana, dan fasilitas yang masih minim untuk mengadakan pertemuan atau forum diskusi dan untuk mengadakan kegiatan lainnya. Dari penyajian data di atas dapat diinterpretasikan Pokja Klampis Ngasem dalam mengadakan setiap pertemuan forum diskusi masih menggunakan fasilitas kelurahan atau balai RW, selain itu juga kesekretariatan Pokja masih menggunakan rumah ketua Pokja. Dimana berdasarkan hasil wawancara, kedepannya Pokja Klampis tersebut menginginkan adanya fasilitas sendiri sebagai tempat rapat atau pertemuan forum diskusi dan juga sebagai tempat kesekretariatan.

IV.1.4 Dampak/Output Setelah Ada Program COP

Program COP di Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem telah berjalan lebih dari dua tahun. Berdasarkan hasil pengamatan dan juga wawancara berbagai sumber, dapat diinterpretasikan bahwa program COP ini telah memberikan suatu *output* atau dampak langsung dan tidak langsung bagi masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan dari program COP di dua kelurahan tersebut cenderung hampir sama. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Keputih

dampak yang telah dirasakan bagi masyarakat adalah adanya penurunan tingkat kejahatan curanmor, dimana sebelumnya sebulan bisa terjadi 5 sampai 7 kasus curanmor, sekarang ini terutama dalam 5 bulan terakhir belum ada kasus curanmor sama sekali. Selain curanmor perjudian dan miras juga sudah tidak ada, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara perjudian dan miras sudah tidak dapat ditemui lagi di Kelurahan keputih, bahkan warung-warung yang biasa menjual miras sudah tidak menjual lagi.

Sedangkan untuk dampak tidak langsungnya di Kelurahan Keputih adalah adanya perubahan kultur masyarakat. Perubahan tersebut terjadi secara pelan-pelan dalam masyarakat Keputih. Perubahan nyata dari hasil pengamatan dan wawancara adalah adanya preman-preman yang 'insaf' dimana yang dulu diketahui sering mabuk dan berjudi sekarang sudah tidak lagi. Dari hasil wawancara dengan tokoh pemudanya, diketahui bahkan sikap beberapa preman tersebut menjadi lebih baik, yang jarang berkomunikasi dengan warga menjadi sering, yang dulunya rambutnya 'gondrong' sekarang sudah dipotong. Hal tersebut adalah suatu realitas yang terjadi di Kelurahan Keputih berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara para tokoh masyarakat.

Sedangkan dampak yang dirasakan bagi kelurahan Klampis Ngasem berdasarkan hasil penelitian adalah adanya penurunan angka tindak kejahatan seperti perjudian (terutama judi adu dara), pencurian sepeda motor, dan miras. Berdasarkan hasil wawancara juga dapat diinterpretasikan pula bahwa *output* dari program ini adalah masyarakat Klampis Ngasem sudah tidak segan-segan lagi untuk berkomunikasi dengan polisi, dan saling memberikan informasi. Dimana

berdasarkan temuan data langsung dilapangan dan hasil wawancara, dirasakan sudah terjadi perubahan sikap pada polisi khususnya wilayah Polsek Sukolilo, yang sebelumnya bersikap represif dan tidak komunikatif dengan warga namun sekarang lebih bersikap preventif dan komunikatif dengan warga sekitar.

IV.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM COP

IV.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implemmentasi suatu kebijakan/program, terutama untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi. Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi antara lain transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi. Ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan/program. Apabila dalam koordinasi dan sosialisasi melakukan ke-tiga hal tersebut, maka akan memperoleh dampak/output yang lebih baik.

Program COP merupakan program yang mempertimbangkan pada tiga aspek penting, yaitu mendorong institusi kepolisian yang akuntabel, melibatkan secara aktif masyarakat dalam kebijakan keamanan, serta membentuk serangkaian kerja aksi yang terstruktur dan sistematis antara polisi dengan masyarakat. Tiga aspek tersebutlah yang kini sudah berjalan di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk menjalankan ketiga aspek tersebut dan untuk membantu dalam melakukan koordinasi serta sosialisasi program COP di Kota Surabaya, maka di dua kelurahan tersebut telah dibentuk suatu kelompok kerja (Pokja), yang juga menjadi salah satu *pilot project*. Pembentukan Pokja di



Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem telah dipengaruhi dan telah didasari oleh adanya proses komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan di Kelurahan Klampis Ngasem diawali dengan adanya proses komunikasi di dalam suatu forum diskusi atau disebut *Focus Discussion Group* (FGD). Forum tersebut sebagai awal sosialisasi program dan juga untuk menciptakan komunikasi antara warga dan antara masyarakat dengan polisi, yang difasilitasi oleh Pusham Unair.

Adanya proses komunikasi antara masyarakat dan polisi yang berlangsung dari berbagai forum telah menjadi kesempatan bagi warga di Keputih dan Klampis Ngasem dalam memberikan kritikan, saran, harapan dan komentar pedas kepada kepolisian, yaitu terhadap pelayanannya, kinerjanya, struktur birokrasinya, dan sikap perilaku aparat.

Dari hasil wawancara, saat awal melakukan sosialisasi program COP dengan masyarakat dan pembentukan Pokja di kedua kelurahan tidak berjalan dengan baik. Agenda tujuan forum tidak selalu berhasil, yang semula untuk mensosialisasikan program dan melakukan pemetaan masalah, telah berubah menjadi penghakiman bagi kepolisian, terutama Polsek Sukolilo. Segala macam kritikan dilontarkan kepada pihak aparat keamanan.

Namun hal tersebut hanya terjadi di awal-awal proses sosialisasi, selanjutnya disepakati dibentuknya Pokja COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem. Kesepakatan tersebut adalah hasil dari faktor komunikasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti para tokoh



masyarakat, tokoh pemuda, karang taruna, PKK, aparat kelurahan, RT/RW dan juga kepolisian.

IV.2.2 Sumber Daya

Tujuan dari implementasi program mungkin bisa diteruskan atau dikomunikasikan secara cermat, jelas, dan konsisten kepada masyarakat atau kelompok sasaran, tapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan, maka implementasi tersebut akan cenderung tidak efektif. Oleh karena itu faktor sumber daya merupakan faktor yang penting didalam melaksanakan program COP. Berdasarkan penelitian ini sumber daya meliputi antara lain dana, SDM yang memadai, dan fasilitas-fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara, Implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem masih memiliki keterbatasan sumber dana. Hal tersebut dikarenakan program tersebut "*non profit oriented*", jadi dalam melaksanakan setiap kegiatan masih tergantung oleh bantuan lembaga donor ataupun swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, bantuan tersebut datang terutama dari lembaga donor yaitu *The Asia Foundation* (TAF), selain TAF Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya juga telah mengalokasikan anggaran khusus bagi program COP melalui APBD tahun 2005 dan 2006 dengan jumlah yang tidak diberitahukan. Namun yang diketahui di tahun 2005 bantuan hanya untuk 6 bulan saja. Selain itu adapula sumber lainnya yaitu melalui donatur dari warga di masing-masing Pokja. Dari hasil wawancara donatur tersebut kebanyakan datang



dari warga menengah keatas yang juga sebagai stakeholders seperti pemilik tambak, dan pengusaha yang berada di sekitar wilayah kelurahan tersebut.

Untuk staf (para pelaksana) di kedua kelurahan mengakui bahwa masih ada keterbatasan baik secara kuantitas dan kualitas. Dimana di kedua Pokja masih terus mengikuti berbagai pelatihan atau *workshop* dan juga studi banding, yang diselenggarakan oleh pihak Pusham Unair baik di dalam kota ataupun di luar kota (Jogjakarta, Bali, Malang,). Pelatihan dan studi banding tersebut diutamakan bagi para pelaksana program COP (para pegiat COP).

Hal tersebut telah diupayakan oleh COP dalam menjawab harapan masyarakat. Dari hasil wawancara tersirat harapan dari pengurus Pokja dan juga tokoh masyarakat adalah agar saat ini khususnya para pemuda memiliki kemampuan dalam menguasai informasi dan teknologi. Karena menurut beberapa sumber yang diwawancarai, di era globalisasi saat ini apabila tidak mampu mengetahui informasi dan teknologi maka akan tertinggal.

Mengenai fasilitas berdasarkan hasil wawancara sumber dirasakan juga masih sangat kurang. Dalam hal ini Pokja COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem belum memiliki tempat kesekretariatan sendiri, dan masih meminjam rumah Ketua Pokja sebagai tempat untuk kesekretariatan. Selain itu untuk mengadakan pertemuan atau forum diskusi, Pokja juga masih meminjam fasilitas dari Kelurahan atau balai RW. Namun selama ini pihak kelurahan dan juga tokoh masyarakat setempat yang telah diwawancarai merasa tidak keberatan apabila fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.



Peminjaman fasilitas kelurahan/balai RW memang sudah biasa dilakukan, di Pokja Keputih pemakaian fasilitas kantor kelurahan sebagai tempat forum diskusi/pertemuan bahkan hingga larut malam. Dan respon Lurah Keputih sangat positif sekali dengan kegiatan forum diskusi tersebut. Sedangkan di Pokja Klampis Ngasem juga sudah terbiasa mengadakan pertemuan di kantor kelurahan dan balai RW, terutama RW 3. Respon dari Lurah pun sangat positif dan juga mendukung karena program COP melibatkan berbagai elemen masyarakat dan juga kepolisian.

IV.2.3 Disposisi (Sikap Pelaksana)

Selain faktor objektif yang mempengaruhi implementasi program COP, adapula faktor subjektif. Faktor yang berdasarkan subjektifitas tersebut adalah disposisi atau sikap para pelaksana, yang dipengaruhi oleh pemahaman, pandangan-pandangan atau respon dari para pelaksana, dan kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman para pelaksana dalam program COP di Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem umumnya baik. Mereka cukup paham bahwa COP merupakan suatu program yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan juga untuk membantu proses reformasi kultural kepolisian yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan polisi. Dapat diinterpretasikan bahwa para pelaksana dari Pokja, Pusham Unair, Polsek (Babinkamtibmas) dan masyarakat telah mendukung program ini, terbukti dari sikap para tokoh maupun anggota kepolisian yang bersedia menjadi



pengurus Pokja dan mendukung program tersebut. Selain itu para aparat dari kedua kelurahan dan kepolisian Polsek Sukolilo juga telah memberikan respon positif selama lebih dari dua tahun berjalannya program ini di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem.

Dapat di interpretasikan pula bahwa pandangan para pelaksana tidak bertentangan dengan tujuan program. Dalam hal ini ada kecenderungan program dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana. Dapat dibuktikan dari hasil penelitian baik di Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem, bahwa tidak ditemukan ada hal yang bertentangan secara langsung dengan pandangan para pelaksana ataupun kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

IV.2.4 Struktur Birokrasi (Organisasi)

Setiap adanya implementasi suatu program/kebijakan pasti melibatkan unsur pemerintahan sebagai aparat pelaksana. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut. Dalam implementasi program COP di Surabaya keterlibatan Pemerintah Kota Surabaya dan Polwiltabes Surabaya merupakan suatu bentuk dukungan dari aparat birokrasi dan juga aparat keamanan untuk mewujudkan tujuan program, selain dari badan-badan pelaksana/organisasi yang terkait di lapangan, yaitu The Asia Foundation dan Pusat Studi Hak Azasi Manusia (Pusham Unair).

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program COP di dua kelurahan yaitu Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem, keterlibatan langsung



birokrasi terletak atau terfokus pada aparat di kelurahan dan kepolisian di wilayah Polsek (Polsek Sukolilo). Dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung diketahui bahwa di Kelurahan Keputih maupun Klampis Ngasem telah memiliki kelompok kerja (Pokja COP) masing-masing sebagai pelaksana program di tingkat kelurahan, dimana juga dibantu atas keterlibatan struktur organisasi kemasyarakatan lainya yaitu PKK, Karang Taruna, dan RT/RW.

Namun dari perkembangan hasil penelitian di lapangan diketahui adapula hambatan dari struktur birokrasi yaitu selama ini masih belum adanya kesepakatan *standart operating procedures* (SOP) atau standarisasi pelayanan minimum (SPM) dan juga standarisasi mengenai biaya pelayanan dari struktur birokrasi kepada masyarakat. Hal tersebutlah hingga sampai sekarang masih diperjuangkan oleh COP maupun aparat yang ada di pemerintahan (kelurahan) maupun yang di kepolisian (Polsek).

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan, dengan adanya respon positif dari birokrasi sedikit banyak memberikan ruang bagi pelaksanaan program COP di Kelurahan keputih dan Klampis Ngasem. Bahkan respon positif tidak hanya ada dalam struktur pemerintahan saja, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, bahkan institusi-institusi kepolisian. Dimana hal tersebut telah dirasakan menjadi suatu sistem yang diciptakan untuk menjalankan implementasi program COP di dua kelurahan tersebut.



IV.2.5 Dukungan Masyarakat (Kelompok Sasaran)

Selain faktor pengaruh di atas adapula faktor dukungan masyarakat yang mempengaruhi sukses tidaknya suatu kebijakan/program. Sesuai dengan pendapat Muhammad Syukur Abdullah maka setiap kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu program itu sendiri, aparat pelaksana program, serta kelompok sasaran (*target group*). Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya dukungan masyarakat suatu kebijakan atau program tidak akan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang sebelumnya. Begitu pula dengan program COP yang sudah diimplementasikan di Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem cukup mendapatkan dukungan dan respon positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya partisipasi masyarakat yang begitu besar terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh COP, baik pertemuan (forum diskusi), maupun didalam pelaksanaan program-program seperti penyelesaian terhadap masalah keamanan (perjudian, miras, curanmor), dan juga terhadap masalah sosial kemasyarakatan (seperti pendataan penduduk pendatang, beasiswa anak sekolah yang kurang mampu, pemindahan TPA, perbaikan jalan, dan pembuatan akte kelahiran), selain itu juga mengenai masalah HAM (perlindungan hak anak dan kekerasan dalam rumah tangga).

Para informan dari hasil wawancara menanggapi secara positif adanya program COP, baik dari tokoh masyarakat, kepolisian, kelurahan, dan tokoh pemuda. Hal tersebut yang dapat diamati oleh peneliti adalah adanya partisipasi



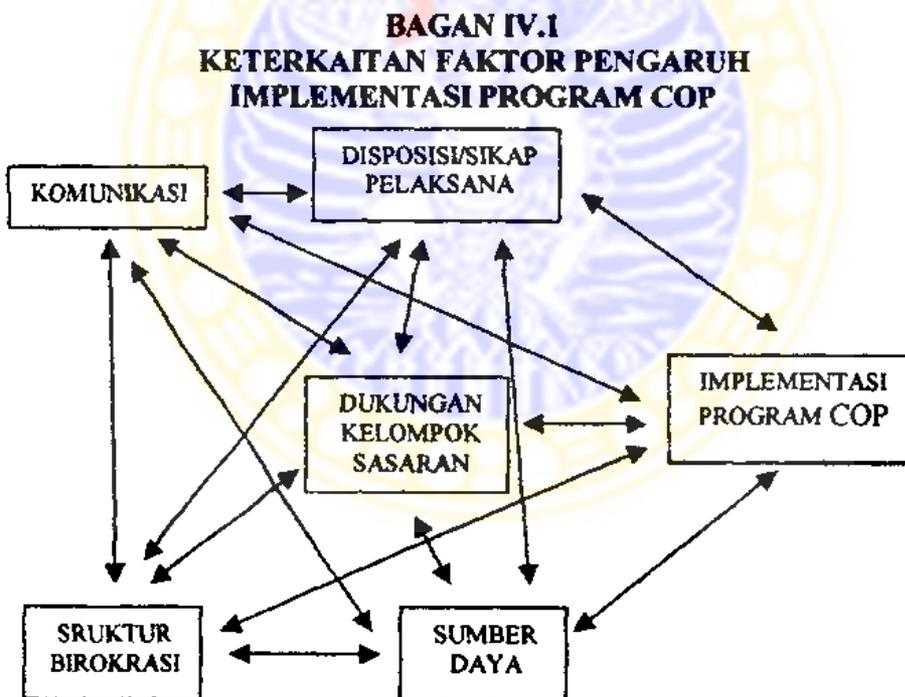
kepolisian Polsek Sukolilo yaitu Binmaspol yang ikut serta dalam setiap forum diskusi COP, sedangkan dari aparat kelurahan adalah partisipasi dalam memberikan fasilitas untuk pertemuan, seperti di balai kelurahan atau balai RW.

Apabila dilihat dari faktor pengaruh di atas dapat diinterpretasikan bahwa yang menjadi faktor awal penentu suksesnya pelaksanaan program COP karena adanya proses komunikasi. Komunikasi telah dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, ataupun forum-forum diskusi antar berbagai pihak antara lain tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di masing-masing kelurahan (Kelurahan Keputih & Kelurahan Klampis Ngasem), dan juga melibatkan struktur birokrasi/organisasi aparat kelurahan dan kepolisian (Polsek Sukolilo). Hal tersebut telah berhasil menciptakan adanya suatu bentuk dukungan masyarakat atau adanya respon positif dari berbagai pihak.

Dari hasil proses komunikasi diatas telah menciptakan adanya dukungan masyarakat, dan besarnya dukungan masyarakat tersebut menjadikan terbentuknya kelompok kerja (Pokja) COP, dimana Pokja itu memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusianya juga termasuk sumber daya dana. Dan adanya sumber daya tersebut akan menciptakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi (sikap) dari para pelaksana baik secara pribadi ataupun organisasi. Sikap para pelaksana tersebut dapat diartikan juga sebagai pandangan para pelaksana terhadap program COP. Terciptanya disposisi atau sikap para pelaksana juga terkait dengan adanya struktur birokrasi/organisasi, dalam hal ini adalah keterkaitan aparat kelurahan dan juga kepolisian dalam program COP.



Dari analisis data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program COP di atas, yaitu faktor struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi/sikap pelaksana & dukungan publik (kelompok sasaran), maka dapat ditarik suatu benang merah, bahwa pada dasarnya antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya sangat terkait dan saling mempengaruhi. Dimana pada akhirnya bersama-sama akan sangat berpengaruh kepada proses implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem. Dan untuk lebih jelas mengenai keterkaitan antara faktor-faktor tersebut, maka berikut adalah uraian dalam bentuk bagan :





BAB V PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Pada bab V ini penulis akan mengetengahkan kesimpulan, saran dan implikasi penelitian berdasarkan hasil temuan data di lapangan serta analisa dan interpretasi data yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan hal yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dan aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga tahap, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Oleh karena itu dalam bab ini, maka akan diketengahkan beberapa *conclusion* (kesimpulan).

Kesimpulan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah mengenai “bagaimana implementasi program COP di Kelurahan Keputih & di Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya”. Selain itu juga mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program COP di kedua wilayah kelurahan tersebut”.

Dengan menggunakan analisa data kualitatif & tipe penelitian deskriptif juga mendasarkan pada latar belakang & kerangka pemikiran teoritik yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum program COP merupakan salah satu



program untuk kamtibmas, dan juga sebagai program untuk mendukung reformasi Polri di bidang kultural.

Implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem dibentuk dalam suatu kelompok kerja (Pokja COP), dan sudah berjalan lebih dari dua tahun sejak 8 April 2004. Program tersebut telah didukung penuh oleh *The Asia Foundation* (TAF) sebagai lembaga donor yang men-suport dibentuknya COP di Surabaya dan bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Airlangga (Pusham Unair) sebagai fasilitator maupun mediator program COP baik di lingkup kota maupun kelurahan yang ada di Surabaya.

Implementasi program COP di Surabaya terutama di wilayah yang telah dijadikan *pilot project* antara lain Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem ternyata tidak hanya melibatkan dua lembaga tersebut (TAF&Pusham Unair), tapi juga instansi dari pemerintahan. Dalam hal ini adalah aparat kelurahan yaitu Kelurahan Keputih & Kelurahan Klampis Ngasem, selain itu juga melibatkan instansi kepolisian terutama dalam hal ini adalah Kepolisian Sektor yaitu Polsek Sukolilo.

Dari hasil penelitian kedua instansi tersebut telah memberikan respon yang sangat positif kepada program COP. Terbukti dari tiap kali pertemuan yang diadakan Pokja COP di dua kelurahan, kedua instansi tersebut ikut partisipasi dan melibatkan diri. Dari Polsek Sukolilo biasanya telah didelegasikan untuk COP yaitu Babibkamtibmas, sedangkan dari aparat kelurahan juga telah diwakilkan oleh stafnya dari Kesra. Dari hasil wawancara beberapa informan, tak jarang juga



dari beberapa kali pertemuan kedua kepala instansi tersebut ikut berpartisipasi yaitu Lurah dan Kapolsek. Selain itu berbagai organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna dan elemen masyarakat lainnya RT/RW juga ikut dilibatkan oleh Pokja COP dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program COP di dua kelurahan, baik yang ada di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem.

Untuk instansi Kecamatan Sukolilo memang kurang dilibatkan secara langsung dalam implementasi program COP oleh Pokja baik yang ada di Kelurahan Keputih dan Klampis Ngasem. Tapi dari hasil wawancara dengan tim COP maupun dari Pusham Unair ternyata telah melakukan sosialisasi dan juga komunikasi langsung ke Camat setempat. Dan berdasarkan hasil wawancara, respon dari Camat Sukolilo pun sangat positif dan mendukung, karena menilai bahwa program COP untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah sektoral, serta bertujuan mendukung proses reformasi Polri di bidang kultural.

Terkait masalah keamanan dan juga reformasi kultural Polri, program COP di Kelurahan Keputih & Klampis Ngasem telah membawa dampak/output nyata. Berdasarkan hasil temuan data langsung di lapangan dapat disimpulkan bahwa output program ini adalah sebagai "*social control*" dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan, ketertiban dan juga berkaitan dengan masalah isu-isu kepolisian sebagai aparat sipil (seperti pelayanan, kinerja, dan sikap para personil). Selain itu program COP di dua kelurahan tersebut juga memberikan dukungan kepada instansi-instansi kepolisian (Polsek Sukolilo) maupun instansi pemerintahan di tingkat kecamatan & kelurahan didalam



melakukan tugasnya menjaga stabilitas kamtibmas dan juga memberikan suatu bentuk pelayanan sosial dan kultural kepada masyarakat.

Dampak/output yang dirasakan oleh kepolisian Polsek Sukolilo adalah para aparat sudah tidak sulit lagi untuk ditemui, bahkan aparat tidak segan-segan memberikan no hp untuk sewaktu-waktu dapat dihubungi oleh warga. Dari hasil penelitian apabila ada pertemuan atau forum seperti yang diadakan COP, aparat kepolisian (Babinkamtibmas) dengan senang hati menghadirinya untuk berkomunikasi langsung dengan warganya dalam membahas isu-isu yang sedang marak baik masalah kamtibmas, sosial, maupun masalah dalam kepolisian itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian memang komunikasi sudah tidak lagi menjadi hambatan, dan jarak vertikal antara polisi dan masyarakat juga semakin dekat karena adanya prinsip kemitraan atau kesetaraan dari program COP.

Program COP di dua kelurahan tersebut berdasarkan hasil penelitian berperan sebagai fasilitator dan juga mediator bagi terwujudnya tugas dan fungsi instansi-instansi pemerintahan dan kepolisian di dalam masyarakat. Contoh nyata yang ada di lapangan dalam hal ini adalah di Kelurahan Keputih, yaitu telah dilakukannya pendataan penduduk bagi warga pendatang yang belum terdata, pembuatan Kipem (kartu izin penduduk musiman), pemberian bantuan/beasiswa bagi anak sekolah dasar yang kurang mampu, dan juga penyelesaian berbagai masalah sosial dan masalah kamtibmas lainnya (seperti perjudian togel, adu dara minuman keras, curanmor). Dimana dalam penanganannya mengupayakan dengan mencari solusi ke akar permasalahannya, tanpa melakukan tindakan yang represif. Sekarang ini yang telah dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Keputih adalah



adanya penurunan kasus curanmor, dan juga sudah sangat berkurang masalah perjudian, dan minuman keras.

Sedangkan yang ada di Kelurahan Klampis Ngasem dari hasil data penelitian dapat ditarik kesimpulan juga hampir sama dengan dampak yang ada di Kelurahan Keputih, yaitu pencurian sepeda motor berkurang, perjudian dan miras juga sudah jarang ditemukan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, output lainnya dari program ini adalah sudah terjalinnya komunikasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat, dimana dulunya hampir tidak ada komunikasi tersebut.

Namun implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem juga terdapat beberapa hambatan dan faktor yang mempengaruhi. Dari hasil penelitian lapangan di Pokja COP Kelurahan Keputih, faktor yang sangat mempengaruhi implementasi COP adalah dukungan masyarakat. Dan adanya dukungan tersebut disebabkan oleh adanya proses komunikasi dan sosialisasi. Jadi dua faktor komunikasi dan dukungan masyarakat tersebut menjadi paling berpengaruh dibandingkan faktor lainnya, seperti sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Karena program COP ini program yang berorientasikan langsung kepada masyarakat. Setelah adanya kedua faktor tersebut maka barulah terdapat faktor lainnya yang berpengaruh yaitu sumber daya (SDM, dana & fasilitas), sikap/kecenderungan pelaksana, dan struktur birokrasi/organisasi baik instansi pemerintahan (Pemerintah Kota kecamatan & Kelurahan), kepolisian (Polwiltabes & Polsek), maupun lembaga/organisasi lainnya yang terkait (TAF & Pusham Unair).



Berdasarkan hasil penelitian, di Pokja Keputih dukungan masyarakat timbul karena adanya berbagai pertemuan atau forum diskusi yang diadakan antar elemen masyarakat dan juga antar polisi dengan masyarakat baik di kantor kelurahan maupun di balai RW. Dan sekarang ini dukungan dari masyarakat Keputih semakin diperkuat oleh adanya dampak media baik cetak dan elektronik (Buletin Sorot & Radio COP 104 FM). Terutama setelah mulai dioperasikan stasiun Radio Komunitas COP 104 FM yang berlokasi di daerah Kelurahan Keputih.

Dari hasil wawancara penelitian, adanya radio tersebut dinilai masyarakat lebih efektif dalam hal melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat selain dengan kegiatan forum pertemuan diskusi (*Focus Group Discussion*). Dengan radio COP masyarakat merasa dilibatkan langsung dalam setiap pembicaraan topik-topik tertentu baik mengenai permasalahan keamanan, isu-isu kepolisian, dan masalah sosial. Dalam hal ini masyarakat bisa langsung berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, karena berlangsung secara interaktif dengan narasumber yang kompeten dibidangnya dan dilakukan "On Air" yang bisa didengar langsung oleh masyarakat.

Sedangkan untuk Pokja COP Kelurahan Klampis Ngasem juga dijumpai beberapa hambatan dan faktor yang mempengaruhi implementasi program COP di daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi hambatan adalah dimana saat melakukan proses sosialisasi program. Pada awalnya sosialisasi beberapa agenda pertemuan selalu gagal tidak sesuai dengan tujuan, dan masyarakat cenderung curiga dengan COP. Namun setelah beberapa kali



dilakukan sosialisasi serta pemahaman, dukungan masyarakat semakin lama semakin besar. Dan faktor dukungan masyarakat dan komunikasi juga menjadi faktor kunci awal yang mempengaruhi implementasi program COP.

Setelah berjalan lebih dari 2 tahun faktor pengaruh lainnya ternyata juga tidak dapat dipisahkan, antara lain seperti masalah sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi (sikap pelaksana). Dari hasil wawancara sumber daya ternyata sangat diperlukan untuk mendukung implementasi program, struktur birokrasi juga dinilai menjadi hal yang penting karena setiap pelaksanaan kegiatan program COP akan selalu berurusan dengan birokrasi, dan yang terpenting juga adalah sikap para pelaksana yang menjadi motor penggerak pelaksanaan program COP di wilayah Pokja. Dan akhirnya kelima faktor tersebut menjadi perlu terus diperhatikan bagi implementasi program COP kedepannya.

Pada akhirnya dapat pula disimpulkan bahwa program COP memang bertujuan untuk mendukung reformasi Polri terutama di dalam aspek kultural. Selain itu program COP juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing kelurahan yang memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dan juga memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda.

V.2. SARAN

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam implementasi program COP dan agar tujuan program dapat tercapai, maka dapat disampaikan beberapa saran dari penelitian ini, yaitu :



1. Dalam era-reformasi ini masyarakat lebih cenderung kritis terhadap output birokrasi (instansi pemerintahan termasuk instansi kepolisian) seperti kualitas pelayanan, kinerja, dan sikap para pelaksana. Oleh karena itu COP harus bisa menjadi fasilitator dan mediator yang baik terhadap perubahan yang ada di tengah masyarakat. Antara lain dengan cara melakukan komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan masyarakat di tingkat kelurahan, selain itu juga melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik terhadap struktur birokrasi yang ada seperti instansi pemerintahan (Kecamatan & Kelurahan), instansi kepolisian (Polsek), akademisi (Pusham Unair), organisasi kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LSM), dan juga lembaga donor (*The Asia Foundation*).
2. Pokja COP Keputih dan Pokja COP Klampis Ngasem telah mampu menjalankan program COP selama lebih dari dua tahun terakhir ini dengan baik. Jadi sarannya hal tersebut harus dipertahankan, karena implementasi program COP yang ada di lapangan telah diserahkan kepada masing-masing Pokja bukan lagi staf ahli dari Pusham Unair. Pusham Unair statusnya hanya membantu dalam hal pelatihan atau *workshop*, dan juga membantu apabila dilibatkan dalam setiap kegiatan Pokja. Jadi Pokja harus memiliki visi-misi kedepan dan juga memiliki inisiatif yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat di wilayahnya.
3. Aparat kepolisian seharusnya dapat secara cepat melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap keinginan-keinginan masyarakat dan diharapkan



- bisa memberikan contoh bagi masyarakatnya. Selalu memperbaiki kinerja pelayanan, untuk merubah citra kepolisian di mata masyarakat
4. Pokja COP Keputih dan Pokja COP Klampis Ngasem diharapkan mampu mandiri, oleh karena itu harus mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat. Sarannya adalah kedua Pokja tersebut harus bisa memilih orang-orang yang tepat, kompeten, dan dapat dipercaya di dalam melaksanakan program. Selain itu juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, kelurahan, ketua RT/RW, karang taruna, tokoh pemuda, PKK dan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Pokja tersebut untuk berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan program.
 5. Adanya masalah sumber daya yang masih minim seperti staf (para pelaksana) yang kompeten, dana dan fasilitas yang masih terbatas di kedua Pokja, ternyata memang harus terus diperhatikan. Sarannya adalah untuk SDM, yaitu dengan melalui pengadaan pelatihan-pelatihan atau *training* yang diberikan kepada para pelaksana program COP di masing-masing Pokja. Untuk dana memang diperlukan adanya lembaga donor seperti *The Asia Foundation* untuk bisa membiayai setiap kegiatan yang besar, dan juga masih diperlukan adanya swadaya masyarakat setempat atau donatur dalam mendukung tujuan program. Mengenai fasilitas sebaiknya COP masih tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak yang terkait, baik aparat pemerintahan (kantor kelurahan), aparat kepolisian (kantor Polsek), akademisi (kampus), maupun elemen masyarakat yang lainnya



dalam RT/RW. Yang diharapkan masing-masing pihak tersebut bisa membantu kelancaran implementasi COP dalam hal fasilitas.

6. Supaya sumber-sumber yang telah tersedia tersebut bisa berjalan sebaik mungkin (efektif dan efisien) dengan apa yang telah di gariskan, maka diperlukan juga peran media baik cetak maupun elektronik, sebagai bentuk aliran informasi. Selama ini COP sudah mengupayakan melakukan sosialisasi melalui media buletin Sorot dan Radio Komunitas COP 104 FM, dan upaya tersebut harus tetap diteruskan karena telah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Dan untuk masalah pembiayaan operasionalnya ada baiknya pihak-pihak yang terkait memberikan bantuan dana operasional, seperti Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, dan juga lembaga donor seperti *The Asia Foundation*.

V.3. IMPLIKASI PENELITIAN

Dari berbagai uraian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu Administrasi Negara, terutama dalam ruang lingkup Studi Implementasi Kebijakan/Program. Dalam kaitannya terhadap studi implementasi kebijakan dapat diketahui ternyata model implementasi George C. Edward dengan 4 variabel (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) telah memberikan suatu analisis teori terhadap permasalahan penelitian ini.



Karena tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi sehingga perlu juga keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka dalam permasalahan penelitian ini peneliti juga mengelaborasi atau menambahkan variabel dukungan publik/kelompok sasaran dari model Mazmanian & Sebatier. Dimaksudkan agar bisa lebih memberikan penjelasan dan melengkapi keterkaitan dalam implementasi program COP di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem.

Implikasi lain adalah berkenaan dengan reformasi kepolisian dan stabilitas kamtibmas yang menjadi pencapaian tujuan program COP. Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa COP bermaksud mendukung reformasi kepolisian pada aspek kultural, dan juga menjaga keamanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu yang seharusnya menjadi perhatian adalah standar dan tujuan program, untuk dapat dipahami oleh para pelaksana, individu ataupun kelompok, agar para pelaksana dan masing-masing individu/kelompok tersebut bertanggungjawab untuk mencapai tujuan program.

Perlunya standar dan tujuan program ditetapkan dengan jelas, supaya para pelaksana dapat mengetahui apakah yang diharapkan oleh program COP. Karena tujuan akan menjadi dasar bagi penentuan langkah pengembangan program selanjutnya. Dalam hal ini komunikasi merupakan faktor yang vital dalam memusatkan pada kejelasan standar dan tujuan, transmisi, akurasi dan konsistensi (kesamaan) bagi implementasi program COP. Dan komunikasi tersebut sebaiknya senantiasa dilakukan baik di dalam dan di antara organisasi yang terlibat. Selain itu diperlukan juga mekanisme kelembagaan dan prosedur yang dapat mengatur



kewenangan. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pelaksana mengimplementasikan program dengan konsisten berdasarkan standar dan tujuan kebijakan. Dan hal tersebut akan lebih baik dan sesuai bila COP ingin tujuannya benar-benar terwujud, demikian pula bagi kebijakan dan program-program yang berorientasikan kepada masyarakat lainnya.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait terutama yang berkompeten di dalam mengimplementasikan program COP. Oleh karena itu saran-saran juga implikasi yang telah disampaikan diatas diharapkan pula dapat menjadi pertimbangan bagi program COP untuk kedepannya. Selain itu juga bisa memberikan masukan bagi program-program yang berorientasikan masyarakat lainnya, terutama yang berhubungan dengan reformasi kepolisian dan program-program untuk kantibmas.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Syukur., *"Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research And case Studies)"*, LAN, Jakarta, 1988.
- B. Miles, Matthew & Huberman, A Michael, *"Analisis Data Kualitatif"*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1984
- Dunn, William N., *"Analisis Kebijakan Publik"*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 2003.
- Hariadi, Sri Sanituti., *"COP Dalam Agenda Reformasi Polri: Harapan, Tantangan dan Kenyataan"*, Pusham Unair, Surabaya, 2005.
- Hariwijaya, & Triton, *"Pedoman Penulisan Skripsi Dan Tesis"*, Tugu, Yogyakarta, 2005.
- Islamy, Irfan., *"Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara"*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Moh, Nazir., *"Metode Penelitian"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Moleong, Lexy., *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Nogroho D, Riant., *"Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi"*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto., *"Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia"*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- S. Yunanto, *"Evaluasi Reformasi Sektor Keamanan Di Indonesia TNI Dan Polri"*, The Ridep Institute dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2005.
- Singarimbun, Masri & Efendi, Sofian., *"Metode Penelitian Survei"*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Subarsono, *"Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, Dan, Aplikasi"*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005.
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Administrasi"*, Alfabeta, Bandung, 2005.



Thoha, Miftah "*Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*", Rajawali pers, Jakarta, 2005.

Tjokroadmidjojo, Bintoro., "*Pengantar Administrasi Pembangunan*", LP3ES, Jakarta, 1995.

Wahab, Solichin Abdul., "*Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*", Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Winarno, Budi., "*Teori Dan Proses Kebijakan Publik*", Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.

Artikel :

Antun, *Penulisan Laporan Penelitian (Tiga Kelompok Informan)*, jurnal hand out mata kuliah MPIAN, 21 Oktober 2005.

Brigadir Jenderal Polisi Drs Sutarso, 2004., Dalam buku *COP Dalam Agenda Reformasi Polri: Harapan, Tantangan Dan Kenyataan*, Pusham Unair, Surabaya, 2005, hal 102.

Herbin Siahaan, "*Pengalaman Community Policing dalam Agenda reformasi Kepolisian Di Indonesia*", PO Law Program The Asia Foundation, Surabaya 2005.

Irjen Pol. Drs. Edy Sunarno (Kapolda Jawa Timur), "*Community Policing Sebagai Kebijakan Polda Jatim Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban masyarakat*", Surabaya, 2005.

Kepala Biro Binmas Sdeops Polri Brigjen. Pol. Drs. Sutarso, "*Urgency Community Policing Di Indonesia*". Seminar Nasional Urgensi Community Policing Dalam Agenda Reformasi Kepolisian, Sheraton Hotel, Surabaya, 7 Oktober, 2004

Rachel Slocum (1995), Dalam Makalah Bambang Boediono, "*Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Community Policing*", Pusham Unair, Surabaya, Agustus 2005

Ronny Lihawa, "*Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas)*", Biro Binmas Sdeop Polri, Jakarta, Desember 2005 hal VII-19.

Sutarso, "*Urgensi Community Policing di Indonesia*", Seminar Nasional Urgensi Community Policing Dalam Agenda Reformasi Kepolisian, Surabaya, 2004.



Yordan M. Batara-Goa, *"COP Sebagai strategi untuk Meningkatkan Kinerja Polisi Dalam Melayani Publik"*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005. Majalah Sorot.

Internet:

- www.polri.go.id, "Tentang Polri".
- www.polri.go.id, "Bimmaspol".
- www.surabaya.go.id
- Internet artikel: Agung, Januar., "Implementasi COP Sebagai Upaya Reformasi Polri", Tanggal 19 April 2006. (www.yahoo.com)

Media :

- Talk show Halo Polisi, "Polisi Mitra Masyarakat", Indosiar, Jumat, 26-5-2006, Jam 09.30 WIB.
- Majalah Sorot, "COP Berbagi Solusi Atau Memumpuk Behan di Polisi?", Edisi 14, Agustus, Surabaya, 2005.
- Radio Komunitas COP 104 FM, Keputih, Surabaya.

Dokumen/Data :

- Asosiasi Pokja COP Surabaya, STATUTA, Bab III Pasal 5 dan Pasal 6, (Sekretariat Jl. Arief Rahman Hakim No.2A).
- Asosiasi Pokja COP Surabaya, STATUTA, Pasal 7 (Sekretariat Jl. Arief Rahman Hakim No.2A).
- Data Kependudukan Kecamatan Sukolilo s/d Bulan Juli 2006.
- Data Rekapitulasi Pekerjaan Kecamatan Sukolilo s/d Juli 2006.
- Data Monografi Kecamatan Sukolilo Tahun 2006.
- Data Monografi Kelurahan Keputih Tahun 2005.
- Data Kependudukan Kelurahan Keputih s/d Bulan Mei 2006.
- Data Kependudukan Kelurahan Keputih s/d Akhir Bulan Mei 2006.
- Data Potensi sarana dan Prasarana Kelurahan Keputih Tahun 2006.
- Data Monografi Kelurahan Klampis Ngasem Tahun 2005.
- Data penduduk Kelurahan klampis Ngasem s/d Bulan Juni 2006.
- Laporan Akhir Program Community Oriented Policing di Surabaya Maret-Agustus 2005.
- Laporan Akhir Program Community Oriented Policing Di Surabaya, April-Desember 2004, Kerjasama Pusham Unair, Polda Jatim dan The Asia Foundation.
- Laporan Program Community Oriented Policing di Surabaya April-Juli 2004, Kerjasama Pusham Unair, The Asia Foundation, Polda Jatim.



- Laporan Program *Community Oriented Policing*, Pusham Unair, Surabaya, April 2005.
- Laporan Program *Community Oriented Policing* Juii-Desember 2005, Pusham Unair, Surabaya.
- Laporan Program COP Surabaya April-2005.
- Laporan Program *Community Oriented Policing* di Surabaya April-Juli 2005.
- Laporan Program *Community Oriented Policing*, Pusham Unair, Surabaya, April 2006.
- Notulensi Rapat I Asosiasi Pokja, 6 April 2005, Pusham Unair, Surabaya.
- Statuta Pokja COP Surabaya, Sekretariat Jl. Arief Rahman Hakim No.2A, Klampis, Surabaya.
- Statuta Asosiasi Pokja COP Surabaya, Pasal 8 Sekretariat COP Jl. Arief Rahman Hakim No.2A, Klampis.

